

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

**PELAKSANAAN TUGAS CAMAT DALAM MENNGKOORDINASI
KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN
MINAS KABUPATEN SIAK**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau*



MELIANA NAFIYA

NPM: 177310433

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

PEKANBARU

2021

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmannirrohim,

Segala puji dan syukur kepada Allah swt yang telah melipahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Bidang Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau, yang menganalisis mengenai: **“Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Minas Kabupaten Siak”**

Dalam penulisan ini, penulis telah banyak mendapat bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Kepada pihak-pihak yang telah berkenan membantu dan memberikan semangat serta masukan kepada penulis, penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syarinaldi. SH, MCL sebagai Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba Ilmu di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr.Syahrul Akmal Latief, S. IP., M. Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Ranggi Ade Ferbian, S.IP, M.Si selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau.

4. Bapak Yendri Nazir, S. Sos., M.Si sebagai dosen pembimbing yang telah berkenan membantu dan membimbing serta memberi arahan kepada penulis selama menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh dosen-dosen khususnya Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu kepada penulis.
6. Terima kasih kepada orang tua penulis tercinta Bapak Kanafi dan Ibu Susi Yanti yang telah bersedia memberikan pendidikan terbaik kepada penulis dengan banyak pengorbanan yang sudah dilakukan.
7. Terima kasih kepada Masyarakat Minas Jaya yang telah memberikan informasi kepada penulis terkait dengan penelitian ini.
8. Serta kepada Siska Putriani teman kos yang selalu menemani dan membantu penulis dalam penulisan ini. Fatma Dewi, Ayu Siti, Rezenita Anggoro, Restyana Agustia Dewi yang selalu mendukung dan menemani penulis dari awal pembuatan Skripsi hingga saat ini.

Akhir kata penulis berharap segala kebaikan yang diberikan menjadi baik dan mendapat ganjaran pahala yang berlimpah dari Allah SWT, dan penulis berharap skripsi ini berguna bagi penulis dan bermanfaat untuk yang membacanya. Aamiin.

Pekanbaru, 20 Juni 2020

Meliana Nafiya
NPM: 177310433

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN NASKA	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	13
A. Studi Kepustakaan	13
1. Konsep Pemerintahan	13
2. Konsep Manajemen	16
3. Konsep Tugas	17
4. Konsep Kepemimpinan	20
5. Konsep Pemberdayaan Masyarakat	22
6. Konsep Koordinasi	25
7. Konsep Komunikasi	29
8. Konsep Kesadaran Pentingnya Koordinasi	30
9. Konsep Kompetensi Partisipan	30
10. Konsep Kesepakatan, Komitmen dan Insentif	31
11. Konsep Kontinuitas Perencanaan	32
B. Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu	32
C. Kerangka Pikir	37
D. Konsep Operasional	38
E. Operasional Variabel	39
F. Teknik Pengukuran	41
BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Tipe Penelitian	45
B. Lokasi Penelitian	45
C. Populasi dan Sampel	45
D. Teknik Penarikan Sampel	46
E. Jenis dan Sumber Data	46
F. Teknik Pengumpulan Data	47
G. Teknik Analisis Data	48
H. Jadwal Kegiatan Penelitian	49
BAB IV GAMBARAN LOKASI PENELITIAN	50
A. Gambaran Umum Kecamatan Minas	50
1. Keadaan Geografis	50
2. Keadaan Wilayah	50
3. Jumlah Penduduk	51
4. Jumlah Pendidikan	52
B. Bagan Struktur Organisasi Kecamatan	53

BAB V HASIL Penelitiandan Pembahasan	70
A. IdentitasResponden	70
1. IdentitasRespodenBerdasarkan Umur.....	70
2. IdentitasRespodenBerdasarkan Jenis Kelamin	71
3. IdentitasRespondenBerdasarkanPendidikan	72
B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	73
C. Faktor Penghambat.....	
BAB VI PENUTUP.....	96
A. KESIMPULAN.....	96
B. SARAN.....	97
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	99



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 NamaKelurahan>NamaLurah di Kecamatan Minas.....	7
Tabel 1.2 Kegiatanpemberdayaanpadabidang ekonomi produktif.....	9
Tabel II. 1 PenelitianTerdahuluTerkaitJudulPenelitian.....	32
Tabel II.2 Operasional Variabel	40
Tabel III.1 DaftarPopulasidanSampel.....	46
TabelIII.2:JadwalPenelitian.....	49
Tabel IV.1 Data Jumlah Penduduk Menurut KK.....	51
Tabel IV.2 Jumlah Sarana Pendidikan.....	53
Tabel V.1 Identitas Responden Berdasar Umur.....	70
Tabel V.2 Identitas Responden Berdasar Jenis Kelamin.....	71
Tabel V.3 Identitas Responden Berdasar Pendidikan.....	72
Tabel V.4 Tanggapan Responden Indikator Komunikasi.....	76
Tabel V.5 Tanggapan Responden Indikator Koordinasi.....	79
Tabel V.6 Tanggapan Responden Indikator Partisipan.....	82
Tabel V.7 Tanggapan Responden Indikator Kesepakatan	85
Tabel V.8 Tanggapan Responden Indikator Perencanaan.....	89
Tabek V.9 Rekapitulasi Tanggapan Responden.....	92

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Model Kerangka Fikir Tentang Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Minas Kabupaten Siak.....37



PERNYATAAN KEASLIAN NASKA

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konfrehensi Skripsi yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Meliana Nafiya
NPM : 177310433
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu(S.1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Minas Kabupaten Siak.

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konfrehensi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naska Usulan Penelitian ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan pernyataan administrasi, akademik, dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya melanggar dan belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konfrehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 10 Nover 2020


METERAI TEMPEL
0844AAJX146613603
MelianaNafiya

PELAKSANAAN TUGAS CAMAT DALAM MENGKOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN MINAS KABUPATEN SIAK

ABSTRAK

Oleh:

MELIANA NAFIYA

Kata Kunci: *Tugas, Koordinasi, Pemberdayaan Masyarakat*

Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Minas Kabupaten Siak, dan untuk mengetahui faktor penghambat bagi camat melaksanakan tugasnya dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah koordinasi dengan penilaian komunikasi, kesadaran pentingnya koordinasi, kompetensi partisipan, kesepakatan, komitmen dan insentif koordinasi, serta kontinuitas koordinasi. Tipe penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah survey deskriptif yaitu dengan menggunakan daftar kuesioner dalam pengumpulan data dan menggunakan metode kuantitatif. Pada penelitian ini terdapat 29.079 sampel dan populasi sebanyak 104 orang, yang terdiri dari camat, sekretaris camat, kepala seksi pemberdayaan, 3 orang kepala desa dan 98 orang masyarakat kecamatan minas jaya. Teknik penarikan sampel yang digunakan untuk masyarakat dan desa menggunakan metode purpose sampling yaitu penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu karena jumlahnya yang besar dan disesuaikan dengan maksud penelitian. Untuk camat, sekretaris camat, dan kepala seksi pemberdayaan masyarakat digunakan teknik penarikan sensus. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu, data primer yang dikumpulkan dengan mengisi kuesioner dan wawancara, sedangkan data sekunder didapatkan dengan hasil observasi. Dalam menganalisis peneliti menggunakan alat bantu tabel. Berdasarkan analisis yang peneliti lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Minas Kabupaten Siak sudah dinilai cukup baik. Untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat, pihak kecamatan sebaiknya melakukan pelatihan terhadap masyarakat untuk memberi masukan serta pengetahuan, agar masyarakat mempunyai kemampuan untuk ikut serta dalam program pemberdayaan yang dilakukan oleh kecamatan, sehingga dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas.

THE IMPLEMENTATION OF THE CAMAT'S DUTIES IN COORDINATING COMMUNITY EMPOWERMENT ACTIVITIES IN THE MINAS SUB DISTRICT SIAK DISTRICT

ABSTRACT

MELIANA NAFIYA

Keywords: *Duty, Coordination, Community Empowerment*

In this study aims to determine the implementation of the duties of the sub district head in coordinating community empowerment activities in Minas sub district Siak district, and to determine the inhibiting factors for the sub district head to carry out his duties in the implementation activities. To notify the type of program that will be implemented, the sub district head coordinates directly to the village head/lurah in each village and sub district, to inform the community to participate in these activities. The formulation of the problem of this research is: How is the implementation of the duties of the sub district head in coordinating community empowerment activities in Minas sub district Siak district? Type in this research is descriptive survey using quantitative methods. The sampling technique used for the community and villages/kelurahan uses purposive sampling method, namely the determination of the sampel with certain considerations because of the large number and according the purpose of the study. Whereas for the camat, the secretary of the camat, and the head of the empowerment section used the census drawing technique, namely by determining the entire population as the research sample, this technique is used because the number of samples is quite small. Data collection techniques used are in the form of questionnaires, documentations, interviews, and observations. So that it can be concluded that the implementation of the duties of the sub district head in coordinating community empowerment activities in the Minas sub district of Siak Regency is already in the quite good category. Because there are still inhibiting factors in the implementation of community empowerment, such as a lack of quality human resources, there is still a lack of supervision that is carried out by the sub district towards the empowerment program that is being carried out.

BAB 1

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Pada hakikatnya pembangunan nasional mencakup terhadap seluruh aspek kehidupan manusia yang dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkesinambungan serta menyeluruh keseluruhan tanah air. Dukungan masyarakat sangat diperlukan dalam pembangunan nasional agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan bersama.

Terwujudnya pemerintahan yang baik merupakan suatu syarat bagi setiap pemerintahan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Untuk mempermudah menjalankan fungsi pemerintahan tersebut, maka wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa.

Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 18 tahun 2016, tentang organisasi perangkat daerah pada pasal 5 ayat 2 huruf (f), dimana kecamatan sebagai salah satu perangkat daerah. Kebijakan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah bahwa kecamatan berubah statusnya dari perangkat wilayah menjadi perangkat daerah. Kecamatan disamakan kedudukannya dengan OPD lainnya seperti dinas daerah dan LTD.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah memberikan otonomi daerah yaitu hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Terdapat pada bagian ketiga tentang urusan pemerintahan konkuren yaitu pada pasal 11 dan 12 .

Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang kecamatan menjelaskan, bahwa kecamatan merupakan suatu perangkat daerah kabupaten/kota sekaligus penyelenggara pemerintahan umum. Sesuai dari amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 bahwa kelurahan dalam peraturan pemerintah kecamatan disebutkan sebagai perangkat kecamatan, bukan lagi sebagai perangkat daerah. Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati/Walikota kepada camat dilaksanakan untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kecamatan dan mengoptimalkan pelayanan publik di Kecamatan sebagai perangkat daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat.

Selain itu Camat juga berperan sebagai kepala wilayah, karena melaksanakan tugas umum di wilayah kecamatan khususnya tugas-tugas atribut dalam bidang koordinasi pemerintahan terhadap seluruh instansi. Berdasarkan isi yang terdapat dalam Pasal 1 poin 3 Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan di sebutkan bahwa “ Kecamatan atau nama lain adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten/Kota yang dipimin oleh camat ”

Selanjutnya pada Pasal (10) Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan, disebutkan bahwa camat menyelenggarakan tugas umum meliputi:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum ditingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum.
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan.
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur Desa

- h. Melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah Kabupaten/Kota yang ada di Kecamatan.
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan bahwa salah satu tugas camat adalah mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Dalam hal koordinasi merupakan bagian dari upaya yang dilakukan oleh kepala wilayah untuk mencapai keselarasan, keserasian, dan keterpaduan antara beberapa pihak yang terkait didalam sebuah kebijakan. Koordinasi dapat diartikan sebagai kewenangan untuk menggerakkan, menyasikan, menyelaraskan, dan menyeimbangkan kegiatan-kegiatan yang spesifik atau berbeda-beda agar semua menjadi terarah pada tujuan tertentu. Kegiatan koordinasi ini melekat pada tugas camat yang merupakan perpanjangan tangan bupati dalam memimpin pemerintahan di Kecamatan.

Selanjutnya ada beberapa tugas camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, berdasarkan pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan, meliputi:

- a. Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/Kelurahan dan Kecamatan
- b. Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan

- c. Efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan
- d. Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati/ Walikota.

Dari uraian di atas dapat kita lihat bahwa tugas camat sebagai pemimpin Dikecamatan sangatlah kompleks dan beragam. Oleh karena itu penulis menitik beratkan dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Memberdayakan mempunyai arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus di cegah bahwa yang lemah menjadi semakin lemah karna kekurangberdayaan menghadapi yang kuat, sehingga perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah sangat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat bukan untuk membuat masyarakat menjadi bergantung pada program pemberian (*charity*), karena pada dasarnya setiap apa yang dinikmati harus dihasilkan atas usaha sendiri (yang hasilnya dapat dipertukarkan dengan pihak lain). Dengan demikian maka tujuan akhir dari pemberdayaan masyarakat ini adalah untuk memandirikan masyarakat, memampukan, dan membangun kekuatan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan.

Kabupaten Siak terdiri dari 14 kecamatan, yaitu Bunga Raya, Dayun, Kandis, Kerinci Kanan, Koto Gasip, Lubuk Dalam, Mempura, Minas, Pusako, Sabak Auh, Siak, Sungai Apit, Sungai Mandau, dan Tualang. Dengan luas wilayahnya mencapai 8.275,18 km². Dan jumlah penduduk berdasarkan data tahun 2018 sebanyak 489. 990 jiwa. Kabupaten ini mengalami pertumbuhan penduduk

yang cukup baik yang selalu berupaya untuk meningkatkan sarana dan prasarana untuk mempromosikan segala kegiatan masyarakat.

Kecamatan Minas merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Siak daerah yang pertumbuhan penduduknya cukup pesat di Riau. Kecamatan Minas sudah terbentuk sejak Tahun 1995. Awalnya Kecamatan Minas merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Mandau, seiring dengan perkembangan zaman terbentuklah Kecamatan Minas .

Tugas dan fungsi dari kecamatan yaitu untuk membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Salah satunya yaitu dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di sebuah kecamatan, tepatnya di Kecamatan Minas. Adapun alasan Pemerintah menerapkan kegiatan pemberdayaan masyarakat yaitu untuk menyejahterakan kehidupan masyarakat dan memberantas kemiskinan. Pemerintah memberi solusi kepada masyarakat dalam rangka menerapkan berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ada di tingkat Kecamatan maupun tingkat Kelurahan. Hal ini disebabkan karena salah satu program yang sangat diprioritaskan, sehingga program ini masih membutuhkan koordinasi yang lebih baik dari kecamatan.

Berikut ini merupakan struktur organisasi yang ada di Kecamatan Minas sebagai berikut:

1. Camat
2. Sekretaris Camat
3. Subag Perencanaan dan Umum

4. Subag Keuangan dan Kepegawaian
5. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan
6. Seksi Pemberdayaan Kampung dan Kelurahan
7. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
8. Seksi Kesejahteraan Sosial

Kecamatan Minas dengan jumlah penduduk 29.072 jiwa pada tahun 2020, angka ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu 28.990 jiwa. Sebagian besar penduduk yang berada di Kecamatan Minas tinggal di Kelurahan Minas Jaya; yaitu sebanyak 44,25% ,dan daerah yang paling sedikit di tempati yaitu di Desa Rantau Bertuah; yaitu hanya 8,96%. Kelurahan Minas Jaya adalah wilayah dengan jumlah penduduk tertinggi di Kecamatan Minas berkisar 145 jiwa/ km persegi, sedangkan Desa Minas Barat dengan kepadatan penduduk berkisar 18 jiwa/ km persegi.

Kecamatan Minas merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Siak, Provinsi Riau yang mempunyai 1 Kelurahan dan 4 Desa dengan luas wilayah 770 Km², saat ini dipimpin oleh seorang Camat H. Hendra Adi Nugraha, S.STP, M.SI. Untuk lebih jelasnya mengenai nama Kelurahan dan nama Lurah dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1 . Nama Kelurahan dan Nama Lurah di Kecamatan Minas

No.	Nama Kelurahan/ Desa	Nama Lurah/Kepala Desa
1.	Kelurahan Minas Jaya	Rudi Hartono,SP.
2.	Desa Minas Barat	Ayang Bahari
3.	Desa Minas Timur	Anas
4.	Desa Mandiangin	Martinus,SP.
5.	Desa Rantau Bertuah	Darbi,S.Ag.

Sumber: Kecamatan Minas 2020

Pada tabel di atas menjelaskan bahwa terdapat 1 Kelurahan dan 4 Desa di Kecamatan Minas. Sebagai camat di wilayah Kecamatan Minas H. Hendra Adi Nugraha, S.STP, M.SI mengharapkan kepada masing-masing Lurah/ Kepala Desa dari Kelurahan dan Desa tersebut dapat melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dan tugas dan kebijakan yang ada.

Dilihat dari salah satu tugas yang dimiliki camat yaitu mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Pada penelitian ini penulis memfokuskan pada program pemberdayaan masyarakat dalam bidang Program Ekonomi Produktif. Saat ini Kecamatan dan Kelurahan bekerja sama untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera. Pihak Kecamatan dan Kelurahan masing-masing sudah mempunyai program pemberdayaan masyarakat guna untuk memberdayakan ekonomi masyarakat setempat. Banyak program pemberdayaan yang sudah dijalankan baik dari tingkat Kecamatan dan tingkat Kelurahan. Berikut ini program pemberdayaan masyarakat yang sudah berjalan di Kecamatan Minas dari tingkat Kecamatan sampai tingkat Kelurahan.

Dari penjelasan yang telah diuraikan diatas maka Camat selaku pemimpin ditingkat kecamatan berperan sebagai koordinator terhadap pihak-pihak yang menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan tersebut. Menurut Terry dalam (Hasibuan, 2006;85) adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah

ditentukan, dapat diketahui bahwa koordinasi merupakan penyeragaman, penyalarsan yang dilakukan seorang pemimpin sehingga koordinator merupakan orang yang menyingkronkan, mempersatukan serta mengarahkan.

Dapat dilihat pada tabel dibawah ini daftar kegiatan pemberdayaan masyarakat pada bidang pembangunan infrastruktur di Kecamatan Minas, sebagai berikut:

Tabel 1.2: Daftar Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pada Bidang Ekonomi Produktif

No.	Desa	Jenis Kegiatan	Volume	Jumlah Dana	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6
1.	Minas Timur	1. Budidaya ulat jerman	1. 20 Orang	1. 9.805.842	APBN
2.	Rantau Bertuah	1. Bantuan bibit merica	1. 1083Batang	1. 49.880.00	APBN
		2. Bantuan alat pengetaman kayu	2. 1 Kegiatan	2. 26.202.600	APBN
3.	Minas Barat	1. Pembelian bibit gurami/lele	1. 1 Kegiatan	1. 82.615.800	APBN
		2. Pembelian bibit cabe	2. 1 Kegiatan	2. 86.362.510	APBN
		3. Pelatihan dan Pembelian tata rias pengantin	1 Kegiatan	3. 121.974.139	APBN

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa dari seluruh kelurahan dan desa di Kecamatan Minas yang terdiri dari 4 desa dan 1 kelurahan yang mana penulis hanya menggunakan 3 desa dalam penelitian ini. Yang mendapat bantuan

pemberdayaan dalam bidang ekonomi produktif, Untuk ke empat desa ini seharusnya diawasi dengan baik oleh camat Minas agar kegiatan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Tetapi dalam pemberdayaan bidang ekonomi produktif ini masih terdapat beberapa masalah yang mengakibatkan fungsi camat sebagai koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat belum berjalan optimal.

Berdasarkan uraian diatas dalam pelaksanaan tugasnya tersebut masih menimbulkan beberapa fenomena sebagai berikut:

1. Kurangnya koordinasi yang dilakukan Camat terhadap program pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Minas sehingga mengakibatkan kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas karena minimnya pengetahuan masyarakat
2. Camat Minas masih kurang dalam menjalankan program kerjanya, seperti yang terdapat dalam peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2018 pasal 10 poin (b) yaitu mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Hal ini terlihat dari program kegiatan pemberdayaan masyarakat yang belum optimal.
3. Belum Maksimalnya koordinasi camat dengan Kepala Desa terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dijalankan

Bertitik tolak dari uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut penelitian mengenai pelaksanaan tugas Camat dalam mengkoordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat, oleh karena itu penulis mengangkat judul penelitian: **“Pelaksanaan Tugas Camat Dalam**

Mengkoordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Minas Kabupaten Siak.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merumuskan permasalahan pokok dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Minas Kabupaten Siak

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

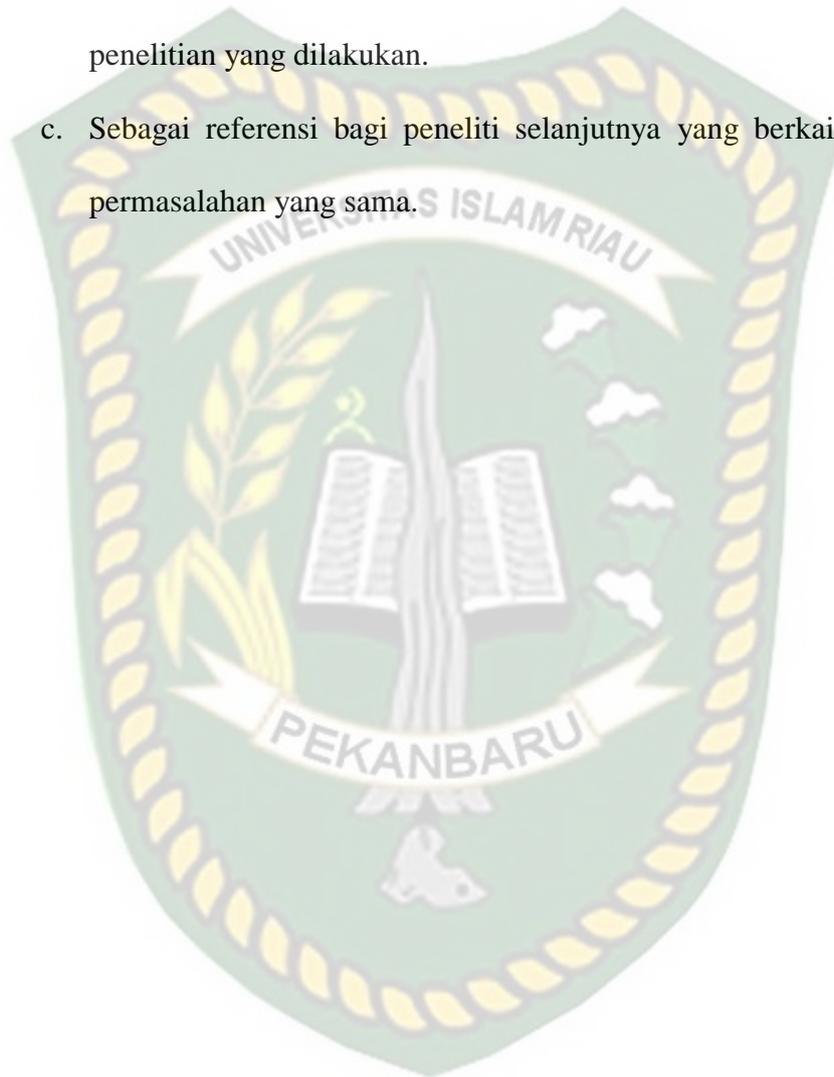
Berikut ini tujuan di lakukannya penelitian:

- a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Minas Kabupaten Siak
- b. Untuk mengetahui faktor yang menjadi penghambat Camat dalam Mengkoordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Minas Kabupaten Siak

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

- a. Sebagai bahan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan Ilmu Pemerintahan.
- b. Sebagai sarana menambah ilmu bagi penulis berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.
- c. Sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan permasalahan yang sama.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

Sebagai acuan berfikir dalam penelitian ini penulis akan menggunakan beberapa teori yang relevan dan sesuai dengan pokok permasalahan untuk memecahkan pokok permasalahan yang ada dalam penelitian yang di ajukan. Dalam penelitian ini penulis akan memaparkan beberapa teori yang telah di rumuskan para ahli.

1. Konsep Pemerintahan

Secara etimologis Pemerintahan berasal dari kata Yunani, '*kubernan*' atau *nahkodah kapal*. Artinya, menatap ke depan (Surbakti,2002;167). Sedangkan pendapat lain mengatakan Pemerintahan berasal dari kata 'perintah'. Kata Perintah memiliki empat unsur yakni, pertama ada dua pihak yang mempunyai keterikatan,. Kedua, kedua belah pihak saling memiliki hubungan *kontraktual*. Ketiga, pihak yang memerintah memiliki kewenangan. Keempat, pihak yang di perintah memiliki ketaatan (Martini dan Juwono, 2015;17).

Menurut Robinson (dalam Kuper, 2000;417), pemerintahan lebih mengacu pada proses pengelolaan politik, gaya atau model pengurusan masalah-masalah umum serta pengelolaan sumber daya umum. Dalam konteks itu menurutnya setidaknya terdapat 3 (tiga) nilai penting yang menjadi sentrum dalam pembicaraan pemerintahan, yaitu; *akuntabilitas*, *legitimasi*, dan *transparansi*.

Akuntabilitas berkaitan dengan seberapa besar efektivitas pengaruh dari mereka yang diperintah terhadap orang yang memerintah. Atau dalam bahasa sederhana adalah seberapa besar tingkat kepercayaan (*trust*) masyarakat terhadap pemerintahnya. Legitimasi menunjukkan pada hak negara untuk menjalankan kekuasaan terhadap warganya serta seberapa jauh kekuasaan tersebut dipandang sah untuk diterapkan. Transparansi berhubungan dengan seberapa terbukanya negara dalam menciptakan mekanisme untuk menjamin akses umum dalam pengambilan keputusan.

Pengertian Pemerintahan menurut Syafii (2007;4) bahwa secara etimologi, pemerintahan dapat diartikan sebagai berikut:

- a. Perintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh. Yang berarti didalamnya terdapat dua pihak, yaitu yang memerintah memiliki wewenang dan yang diperintah memiliki kepatuhan akan keharusan
- b. Setelah ditambah awalan “pe” menjadi Pemerintah. Yang berarti badan yang melakukan kekuasaan memerintah.
- c. Setelah ditambah lagi akhiran “an” menjadi Pemerintahan. Berarti perbuatan, cara, hal atau urusan dari badan yang memerintah tersebut.

Selanjutnya Ndraha (dalam Muhadam Labolo, 2000;79) menyebutkan bahwa pemerintahan memiliki dua fungsi dasar, yaitu:

1. Fungsi Primer, yaitu fungsi pemerintah sebagai *provider* jasa-jasa publik jasa-jasa publik yang tidak dapat diprivatisasikan termasuk jalan hankam, layanan civil, dan layanan birokrasi.

2. Fungsi skunder, yaitu sebagai provider kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan barang dan jasa yang tidak dapat dipenuhi sendiri karena masih lemah dan tak berdaya (*powerless*) termasuk penyediaan dan pembangunan sarana dan prasarana.

Menurut Gaffar dalam Ndraha (2010;16) mendefinisikan ilmu pemerintahan sebagai ilmu yang mempelajari proses politik (alokasi otoritarif nilai-nilai didalam sebuah masyarakat) dalam penyelenggaraan sebuah pemerintahan negara.

Selanjutnya menurut Poelje dalam Ndraha (2010;16) mendefinisikan bahwa ilmu pemerintahan sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk memimpin hidup bersama manusia kearah kebahagiaan yang sebesar-besarnya tanpa merugikan orang lain secara tidak sah.

Sedangkan menurut Munaf (2016;47) pemerintahan dalam paradigma lama memiliki objek material negara, sehingga pemerintahan berorientasi pada kekuasaan, namun dalam paradigma baru pemerintahan dipandang memiliki objek materialnya masyarakat, sehingga pemerintahan dimaknai sebagai suatu proses menata keola kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintahan/negara.

Menurut pendapat Talizduhu Ndraha dalam Hamdi (2010;135) pemerintahan dapat digolongkan kedalam dua golongan besar, yaitu pemerintahan konsentratif dan pemerintahan dekonsentratif. Pemerintahan dekonsentratif terbagi atas pemerintahan dalam negeri terbagi atas pemerintahan sentral dan desentral. Pemerintahan sentral dapat diperinci menjadi pemerintahan umum dan

bukan pemerintahan umum. Yang termasuk dalam pemerintahan umum adalah pertahanan keamanan, peradilan luar negeri, dan moneter.

2. Teori Manajemen

Menurut Paul Harsey dan Ken Blanchard dalam Beddy Iriawan (1993;3) mengemukakan definisi manajemen “sebagai proses kerja sama dengan dan melalui orang-orang dan kelompok untuk mencapai tujuan organisasi”

Menurut George R. Terry (dalam Hadari Nawawi, 2000;36) Manajemen adalah pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya dengan menggunakan bantuan orang lain.

Selanjutnya menurut Mary Parker Follet (dalam Hadari Nawawi, 2000;36) Manajemen adalah seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain.

Menurut George R. Terry dan Leslie W. Rue (2010;1) mendefinisikan manajemen yaitu sebagai suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang ke arah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Manajemen adalah suatu kegiatan, pelaksanaannya adalah “*managing*” mengelola sedang pelaksanaannya disebut *Manager* atau pengelola.

Sedangkan Menurut Donnely, *et. al* (1998;3) “*Manajement is the process undertaken by one or more individuals to coordinate the activities of others to achieve results not achievable by one individual acting alone*”. (manajemen dipahami sebagai proses yang dilakukan oleh satu atau beberapa individu untuk

mengkoordinasikan kegiatan orang lain untuk mencapai hasil yang tidak dapat dicapai oleh satu individu bertindak sendirian)

3. Konsep Tugas

Tugas merupakan suatu kewajiban yang harus dikerjakan, pekerjaan yang merupakan tanggung jawab, perintah untuk berbuat atau melakukan sesuatu demi mencapai suatu tujuan.

Menurut Dale Yoder dalam Moekijat (1998;9) *“The Term Task is frequently used to describe one portion or element in a job”* (tugas digunakan untuk mengembangkan satu bagian atau satu unsur dalam suatu jabatan).

Sementara Stone dalam Moekijat (1998;10) mengemukakan pendapatnya bahwa suatu tugas merupakan suatu kegiatan pekerjaan khusus yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Pengertian lainnya yang menilai bahwa tugas merupakan suatu kegiatan spesifik yang dijalankan dalam organisasi yaitu menurut John dan Mary Miner dalam Moekijat (1998;10) menyatakan bahwa tugas adalah kegiatan pekerjaan tertentu yang dilakukan untuk suatu tujuan khusus.

Sedangkan menurut Moekijat (1998;11) berpendapat bahwa “Tugas adalah suatu bagian atau satu unsur atau satu komponen dari suatu jabatan. Tugas adalah gabungan dari dua unsur (elemen) atau lebih sehingga menjadi suatu kegiatan yang lengkap.

Solichin Abdul Wahab juga mengemukakan bahwa istilah kebijakan sendiri masih terjadi perbedaan pendapat dan menjadi bahan perdebatan oleh para ahli. Untuk memahami istilah kebijakan ini Solichin Abdul Wahab (2008;40-50) memberi pedoman sebagai berikut:

- a. Kebijakan harus dibedakan dari keputusan.
- b. Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi.
- c. Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan.
- d. Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan.
- e. Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai.
- f. Setiap kebijakan mempunyai tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implisit.
- g. Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung panjang.
- h. Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intra organisasi.
- i. Kebijakan publik meski tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah.
- j. Kebijakan didefinisikan secara subjektif.

Menurut pemikiran Aderson dalam Wahab (2004;3) merumuskan bahwa kebijaksanaan sebagai langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor yang berkenaan dengan adanya masalah yang sedang dihadapi.

Selanjutnya menurut Woll (2003;2) menyebutkan bahwa kebijakan publik adalah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah dimasyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Sedangkan menurut Thomas R Dye (2009;19) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “is whatever government choose to do or not to do” (apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan).

Begitu juga dengan pendapat Chandler dan Plano (2003;1) yang menyatakan bahwa kebijakan publik ialah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah.

Dari pengertian pakar di atas, maka dapat dikemukakan elemen yang terkandung dalam kebijakan publik sebagaimana apa yang dikemukakan oleh Anderson dalam Islami yang antara lain mencakup:

1. Kebijakan selalu mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu.
2. Kebijakan berisi tindakan atau pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah.
3. Kebijakan adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah.
4. Kebijakan publik bersifat positif (merupakan tindakan, pemerintah mencari masalah tertentu) dan bersifat negatif (keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu).
5. Kebijakan publik (positif) selalu berdasarkan pada peraturan perundang-undangan tertentu bersifat memaksa (otoritatif).

4. Konsep Kepemimpinan

Beddy Iriawan Maksudi (2014;10) menjelaskan secara etimologi kepemimpinan berasal dari kata dasar “pimpin” yang jika mendapat awalan “me” menjadi “memimpin” yang berarti menuntun, menunjukkan jalan, dan membimbing. Perkataan lain yang sama dengan artinya adalah mengetuai, mengepalai, memandu, dan melatih dalam arti mendidik dan mengajari supaya dapat mengerjakan sendiri.

Beddy Iriawan Maksudi (2014;10) mengutip beberapa pengertian kepemimpinan yang selama ini dikembangkan oleh beberapa ahli, antara lain:

1. Kepemimpinan adalah pengaruh antar pribadi didalam situasi tertentu dan langsung melalui proses komunikasi untuk mencapai suatu atau beberapa tujuan tertentu. (Tennebaum, Weschler, dan massarik, 1995;99).
2. Kepemimpinan adalah sebagai kemampuan seseorang atau pemimpin untuk memengaruhi perilaku orang lain menurut keinginan-keinginannya dalam suatu keadaan tertentu. (Terry, 1992;192).
3. Kepemimpinan adalah upaya memengaruhi orang-orang untuk ikut dalam pencapaian tujuan bersama. (Koontz dan O'Donnel, 1995;99).
4. Kepemimpinan adalah: a. Sebagai fokus-fokus kelompok; b. Sebagai kepribadian dan akibatnya; c. Sebagai seni memengaruhi orang lain; d. Sebagai pengguna pengaruh; e. Sebagai tindakan atau tingkah laku; f. Sebagai bentuk persuasi; g. Sebagai hubungan kekuasaan; h. Sebagai alat

mencapai tujuan; i. Sebagai akibat dari interaksi; j. Sebagai pengganti peran; dan k. Sebagai inisiasi struktur. (Mar'at, 2006;26)

5. Kepemimpinan adalah kemampuan seorang pembina untuk mengendalikan, memimpin, memengaruhi pikiran, perasaan atau tingkah laku orang lain. (Suradinata, 1997;11).
6. Kepemimpinan adalah suatu kemampuan yang melekat pada diri seorang tergantung dari macam-macam faktor, baik faktor intern maupun ekstern. (Winardi, 1990;32).
7. Kepemimpinan adalah keterampilan dan kemampuan seseorang memengaruhi perilaku orang lain, baik yang kedudukannya lebih tinggi maupun lebih rendah daripadanya dalam berpikir dan bertindak agar perilaku yang semula mungkin individualisme dan egosentrik berubah menjadi perilaku organisasional. (Siagian, 1999;32).

Menurut Nawawi dalam Pasalong (2013;4) Kepemimpinan adalah kemampuan atau kecerdasan untuk mendorong sejumlah orang (dua orang atau lebih) agar bekerjasama dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terarah pada satu tujuan.

Menurut Joseph C. Rost (2006;103) Kepemimpinan adalah sebuah hubungan yang saling mempengaruhi diantara pemimpin dan pengikut (bawahan) yang menginginkan perubahan nyata yang mencerminkan tujuan bersama.

Menurut pemikiran P. Pigors dalam Syafii (2013;106) berpendapat bahwa *“Leadership is a process of mutual stimulation which by the succesful interplay of*

individual differences, controls human energy in the pursuit of common cause”.

(Kepemimpinan adalah proses saling mendorong melalui keberhasilan interaksi dari perbedaan-perbedaan individu, mengatur daya manusia dalam mengejar tujuan bersama.

Sementara itu, menurut James Black dalam Maulana Ali (2013;15) mengemukakan Kepemimpinan adalah kemampuan meyakinkan orang lain supaya bekerja sama dibawah pimpinannya sebagai suatu tim untuk mencapai atau melakukan suatu tujuan tertentu. Sedangkan menurut Robbins (2002;163) Kepemimpinan adalah kemampuan untuk memengaruhi suatu kelompok untuk mencapai tujuan.

Selanjutnya menurut Tjokromidjojo dalam Kaloh (2010;6) mendefinisikan bahwa seorang pemimpin pemerintah harus senantiasa memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat serta sebutuhan dan kepentingan organisasi pemerintahan.

5. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan Masyarakat Merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan. Soeharto (2006;76).

Menurut Surmayadi (2005;14) berpendapat bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan suatu upaya peningkatan harkat lapisan masyarakat dan pribadi manusia. Upaya ini meliputi

- a. Mendorong, memotivasi, meningkatkan kesadaran akan prestasinya dan menciptakan iklim/suasana untuk berkembang.
- b. Memperkuat daya, dan potensi yang dimiliki dengan langkah-langkah positif berkembangnya.
- c. Penyediaan berbagai masukan dan pembukaan akses kepeluang-peluang.

Sedangkan menurut Widjaja (2011;77) Pemberdayaan Masyarakat adalah Pemberian wewenang pen delegasian atau pemberian otonomi ke jajaran bawah, inti dari pemberdayaan adalah upaya membangkitkan segala kemampuan yang ada untuk mencapai tujuan melalui pertumbuhan motivasi, inisiatif, kreatif, serta penghargaan, dan pengakuan bagi mereka yang berprestasi.

Menurut Widjaja (2003;169) Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri sendiri secara mandiri baik dibidang ekonomi, sosial, agama, dan budaya.

Menurut Mas' oed dalam Mardikanto (2013;26) pemberdayaan diartikan sebagai upaya untuk memberi daya (empowerment) atau penguatan (srengtening) kepada masyarakat. Sedangkan menurut Sumodiningrat dalam Mardikianto (2013;26) keberadaan masyarakat diartikan sebagai kemampuan individu yang

bersenyawa dengan masyarakat dalam membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan.

Selanjutnya masih Sumodiningrat dalam Mardikanto (2013;33-34) mengartikan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pemberian kesempatan atau memfasilitasi kelompok miskin agar mereka memiliki aksesibilitas terhadap sumberdaya yang berupa modal, teknologi, informasi, jaminan pemasaran dan lain-lain.

Menurut Chambers dalam Mardikanto (2013;49) pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial.

Word Bank dalam Mardikanto (2013;28) berpendapat bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan proses meningkatkan kemampuan dan sikap kemandirian masyarakat.

Menurut Nancy Foy dalam Sumaryadi (2005;99) mengatakan bahwa pemberdayaan masyarakat yaitu mendapatkan sebuah kekuasaan agar suara mereka didengar untuk memberikan kontribusi kepada perencanaan dan keputusan yang dapat mempengaruhi seseorang untuk meningkatkan kinerja orang tersebut dan kinerja seluruh organisasi.

Selanjutnya menurut Rappaport dalam Mardikanti (2013;29) pemberdayaan adalah suatu cara agar rakyat, komunitas, dan organisasi diarahkan agar mampu menguasai atau berkuasa atas kehidupannya.

6. Konsep Koordinasi

Menurut Ndraha (2003;290) Koordinasi berasal dari kata *coordination*, *co* dan *ordinare* yang berarti *to regulate*. Dari pendekatan empirik yang dikaitkan dengan etimologi, Koordinasi diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang sederajat (*equal in rank or order, of the same rank or order, not subordinate*) untuk saling memberi informasi dan mengatur (menyepakati) hal tertentu.

Selanjutnya Ndraha (2003;290) menjelaskan secara normatif koordinasi diartikan sebagai kewenangan untuk menggerakkan, menyasikan, menyelaraskan, dan menyeimbangkan kegiatan-kegiatan yang spesifik atau berbeda-beda agar semuanya terarah pada tujuan tertentu. Sedangkan secara fungsional koordinasi dilakukan guna untuk mengurangi dampak negatif spesialisasi dan mengefektifkan pembagian kerja.

Stoner dan Walken (2011;263) menyatakan Koordinasi sebagai berikut: *“Coordination is the process of integrating the objectives and activities of the separate units (departments of functional are as) of an organizational goals efficiently.* Definisi tersebut menunjukkan bahwa Koordinasi itu adalah proses penyatupaduan tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan dari unit-unit atau bagian-bagian dari suatu organisasi yang terpisah untuk memberikan kesatuan tindakan guna mencapai tujuan bersama.

Menurut pemikiran James G. March dan Herbert A. Simon dalam Ndraha (2011;290) bahwa Koordinasi merupakan sebagai suatu proses penyepakatan

bersama secara mengikat berbagai kegiatan atau unsur yang berbeda-beda sedemikian rupa sehingga disisi yang satu semua kegiatan atau unsur itu terarah pada pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan. Dan disisi lain keberhasilan kegiatan yang satu tidak merusak keberhasilan kegiatan yang lainnya.

Menurut Leonard D. White (2011;33) Koordinasi adalah penyesuaian diri dari masing-masing bagian, dan usaha menggerakkan serta mengoperasikan bagian-bagian pada waktu yang cocok, sehingga dengan demikian masing-masing bagian dapat memberikan sumbangan terbanyak pada keseluruhan hasil.

Menurut Awaluddin Djamin (2011;86) diartikan bahwa koordinasi adalah sebagai suatu usaha kerja sama antara badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu, sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu, dan saling melengkapi. Dengan demikian koordinasi dapat diartikan sebagai suatu usaha yang mampu menyelaraskan pelaksanaan tugas maupun kegiatan dalam suatu organisasi.

Hasibuan (2006;85) berpendapat bahwa Koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi.

Menurut G. R Terry (dalam Hasibuan, 2006;85) berpendapat bahwa koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan.

Selanjutnya menurut Siagian (2001;05-22) menyatakan bahwa koordinasi merupakan kegiatan yang menyatukan berbagai kegiatan yang saling berbeda-beda akan tetapi mempunyai tujuan yang saling berhubungan. Sasaran utama koordinasi adalah untuk menciptakan “unity action” yang pada gilirannya akan menjamin keterpaduan pelaksanaan dan sekaligus meningkatkan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kerjasama komponen yang terlibat.

Menurut Tripathi (dalam Moekijat, 2006;39) ada 9 syarat koordinasi yang efektif yaitu:

1. Hubungan langsung
2. Kesempatan awal
3. Kontinuitas
4. Dinamisme
5. Tujuan yang jelas
6. Organisasi yang sederhana
7. Perumusan wewenang dan tanggung jawab yang jelas
8. Komunikasi yang efektif
9. Kepemimpinan dan supervise yang efektif.

Selanjutnya menurut pemikiran Henry Fayol dalam Sutarto (2006;143) yaitu, *Too coordinate means binding together, unifying, and harmonizing all activity and effort.* (Mengkoordinasi berarti mengikat bersama, menyatukan, dan menyelaraskan semua kegiatan dan usaha)

Menurut pendapat George R. Terry dalam Sutarto (2006;144) menjelaskan bahwa, *Coordination is the orderly synchronization of effort to provide the proper amount, timing, and directing of execution resulting in harmonious and unified actions to a state objective.* (Koordinasi adalah sinkronisasi yang teratur dari usaha-usaha untuk menciptakan kepatutan kuantitas, waktu dan pengarahannya pelaksanaan yang menghasilkan keselarasan dan kesatuan tindakan untuk tujuan yang sudah ditetapkan).

March dan Simon dalam Budi Paramitha, (1985;45) menyatakan bahwa koordinasi adalah proses-proses yang digunakan untuk mengintegrasikan peran-peran kedalam tugas yang berbeda dalam suatu unit kerja untuk melaksanakan sekumpulan tugas bersama untuk mencapai tujuan atau sasaran dalam mencapai tujuan.

Selanjutnya menurut E. F. L. Brech dikutip dalam Handayani (2002;54) koordinasi adalah mengimbangi dan menggerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok kepada masing-masing dan menjaga agar kegiatan itu dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya diantara para anggota itu sendiri.

Menurut Handayani (1989;80) Koordinasi dalam proses manajemen dapat diukur melalui indikator berikut ini:

1. Komunikasi
 - a. Ada tidaknya informasi
 - b. Ada tidaknya alur informasi

- c. Ada tidaknya teknologi informasi
2. Kesadaran pentingnya koordinasi
 - a. Tingkat pengetahuan pelaksanaan terhadap koordinasi
 - b. Tingkat ketaatan terhadap koordinasi
3. Kompetensi partisipan
 - a. Ada tidaknya pejabat yang berwenang terlibat
 - b. Ada tidaknya ahli dibidang pembangunan yang terlibat
4. Kesepakatan, komitmen, dan insentif koordinasi
 - a. Ada tidaknya bentuk kesepakatan
 - b. Ada tidaknya pelaksanaan kegiatan
 - c. Ada tidaknya sanksi bagi pelanggar kesepakatan
 - d. Ada tidaknya Insentif bagi pelaksana kesepakatan
5. Kontinuitas perencanaan
 - a. Ada tidaknya umpan balik dari obyek dan subyek pembangunan
 - b. Ada tidaknya perubahan terhadap hasil kesepakatan.

7. Teori Komunikasi

Menurut Hoben dalam buku Teori Komunikasi (2015;15) komunikasi adalah pertukaran pikiran atau gagasan secara verbal.

Menurut Anderson dalam buku Teori Komunikasi (2015;15) mendefinisikan komunikasi merupakan suatu proses dengan mana kita bisa memahami dan dipahami oleh orang lain. Komunikasi ini merupakan proses dinamis dan secara konstan sesuai dengan situasi yang berlaku.

Selanjutnya Barelson dan Steiner dalam buku Teori Komunikasi (2015;16) juga berpendapat bahwa komunikasi adalah proses penyampaian informasi, gagasan, emosi, keahlian, dan lain-lain, melalui penggunaan simbol-simbol, seperti kata-kata, gambar-gambar, angka-angka, dan lain-lain.

Ruechs dalam buku Teori Komunikasi (2015;16) berpendapat komunikasi adalah suatu proses yang menghubungkan satu bagian dalam kehidupan dengan bagian lainnya.

8. Kesadaran Pentingnya Koordinasi

Menurut Inu Kencana S, dkk (1999:87) mengatakan bahwa dalam manajemen pemerintahan di Indonesia, koordinasi menempati peran penting karena begitu banyak kita temui tumpang tindihnya pekerjaan yang disebabkan tidak adanya koordinasi kendati keseluruhannya itu dapat di sinkronkan, di atur demi tujuan dan kepentingan bersama.

9. Kompetensi Partisipan

Menurut H. A. R Tilaar (2009:287) menjelaskan bahwa partisipasi adalah sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana di upayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (*bottom-up*) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya.

Selanjutnya menurut Soegarda Poerbakawatja (1981;251) partisipasi adalah suatu gejala demokrasi dimana orang diikutsertakan di dalam perencanaan

serta pelaksanaan dari segala suatu yang berpusat pada kepentingan dan juga ikut memikul tanggung jawab sesuai dengan tingkat kematangan dan tingkat kewajibannya.

10. Kesepakatan, Komitmen, dan Insentif Koordinasi

Kesepakatan memberikan pengaruh yang dapat membuat orang yang menjadi targetnya mengikuti dan menyetujui apa yang ditawarkan di dalam kesepakatan tersebut. Bentuk kesepakatan yang ada dapat dilihat dari rincian peraturan-peraturan, prosedur-prosedur dan kebijaksanaan-kebijaksanaan.

O'Reilly (1989;11) menyebutkan komitmen karyawan pada organisasi sebagai ikatan kejiwaan individu terhadap organisasi yang mencakup keterlibatan kerja, kesetiaan, dan perasaan percaya terhadap nilai-nilai organisasi.

Steers dan Porter (1983;67) mengatakan bahwa bentuk suatu komitmen yang muncul hanya bersifat loyalitas yang pasif tetapi juga melibatkan hubungan yang aktif dengan organisasi kerja yang memiliki tujuan memberikan segala usaha demi keberhasilan organisasi yang bersangkutan.

Menurut Jiwo Wangso dan Kartanto Broto Harsono (2003;101) mengemukakan bahwan insentif merupakan elemen atau balas jasa yang diberikan secara tidak tetap atau diberikan secara variabel tergantung pada kondisi pencapaian prestasi kerja karyawan.

11. Kontinuitas Perencanaan

Keberlanjutan suatu kegiatan memang sangat dibutuhkan, keberlanjutan terhadap suatu hal dapat memberikan timbal balik terhadap apa yang sudah terlaksanakan untuk perubahan lebih baik kedepannya. Menurut Sondang P.Siagian (1994;108) perencanaan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang daripada hal-hal yang akan dikerjakan dimasa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan.

B. Perbandingan Dengan Penelitian Terdahulu

Sebelum penulis melakukan penelitian mengenai Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Minas Kabupaten Siak, telah ada beberapa penelitian yang juga meneliti berkaitan dengan judul ini, tetapi dari beberapa penelitian yang telah dilakukan tersebut penulis menemukan beberapa perbedaan berdasarkan teori dan hasil penelitian tersebut. Oleh karena itu penulis menjadikannya sebagai referensi dan panduan bagi penulis untuk melakukan penelitian selanjutnya. Adapun perbedaan dari penelitian sebelumnya yaitu sebagai berikut:

Tabel II. 1 Penelitian Terdahulu Terkait Judul Penelitian

Judul Penelitian 1	Persamaan 2	Perbedaan 3
Peranan Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga di Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru	Pada penelitian inipeneliti lebih memfokuskan padaperan camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat berbasi rukun warga di Kecamatan Rumbai	Sedangkan perbedaan pada penelitian yang saat ini ingin dilakukan, penulis lebih menfokuskan kepada kegiatan tugas camat dalam mengkoordinasi kegiatan masyarakat di Kecamatan Minas

Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	2	3
	<p>Pesisir. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama menggunakan indikator koordinasi Metode yang digunakan adalah kuantitatif dan kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun hasil dari penelitian ini adalah pada tahun 2016 dan 2017 program pemberdayaan masyarakat berbasis rukun warga di Kecamatan Rumbai Pesisir sudah berada pada kategori baik.</p>	<p>kabupaten siak. Penelitian ini menggunakan indikator koordinasi. Penulis Menggunakan Metode Penelitian kuantitatif, sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif</p>
<p>Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Peberdayaan Masyarakat di Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu</p>	<p>Pada penelitian ini, peneliti memfokuskan pada pelaksanaan tugas camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Deskriptif yang dilakukan dengan survey. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah analisa deskriptif kuantitatif. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu pelaksanaan tugas camat dalam pemberdayaan masyarakat dibidang ekonomi produktif di Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu dinilai cukup</p>	<p>Sedangkan pada penelitian yang saat ini ingin dilakukan, penulis lebih menfokuskan kepada kegiatan tugas camat dalam mengkoordinasi kegiatan masyarakat di Kecamatan Minas kabupaten siak. Penelitian ini menggunakan indikator koordinasi.</p>

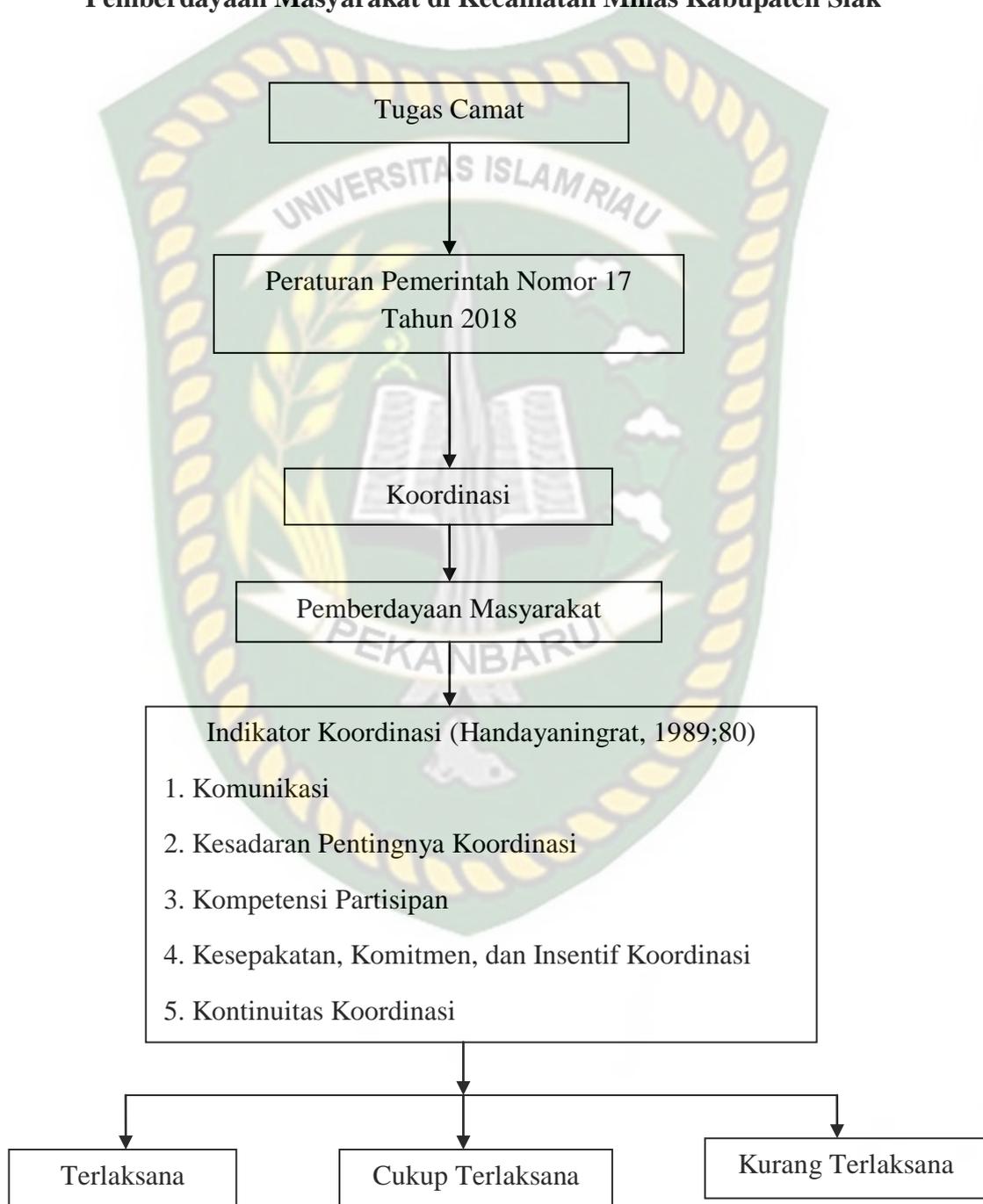
Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	2	3
	baik berdasarkan dari data-data yang didapat.	
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Desa Vokasi di Kelurahan Gedungsari Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang	Pada Penelitian ini, penulis lebih memfokuskan pada pemberdayaan masyarakat melalui program desa gedungsari di Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang.	Sedangkan pada penelitian yang saat ini ingin dilakukan, penulis lebih menfokuskan kepada kegiatan tugas camat dalam mengkoordinasi kegiatan masyarakat di Kecamatan Minas kabupaten siak. Penelitian ini menggunakan indikator koordinasi.

C. Kerangka Pikir

Kerangka pemikiran muncul sejak adanya permasalahan-permasalahan didalam penelitian ini. Pada kerangka pikir ini bertujuan untuk menjelaskan keterkaitan antara variabel dengan indikator yang mempengaruhi sesuai konsep dan teori yang relevan tentang Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Minas Kabupaten Siak. Adapun kerangka pikir tersebut dijelaskan pada gambar berikut:

Gambar II.1

**Kerangka Pikir Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasi Kegiatan
Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Minas Kabupaten Siak**



D. Konsep Operasional

Untuk memperjelas dan menghindari kesalahan dari pemahaman konsep yang telah dicantumkan, maka penulis mengoperasionalkan konsep tersebut untuk mempermudah pemahaman dalam penulisan ini, maka diuraikan konsep operasional sebagai berikut:

- a. Kecamatan adalah sebuah pembagian wilayah administratif negara Indonesia dibawah Kabupaten atau Kota yang dipimpin oleh seorang Camat
- b. Camat adalah pimpinan Kecamatan sebagai perangkat daerah Kabupaten atau Kota, camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintah diwilayah Kecamatan.
- c. Koordinasi adalah suatu proses mengarahkan tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien.
- d. Pemberdayaan masyarakat adalah suatu usaha untuk menyejahterakan masyarakat serta meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat tersebut.
- e. Komunikasi adalah proses menyampaikan informasi yang mempunyai makna tertentu dari satu kelompok tertentu kepada kelompok lainnya.
- f. Kesadaran pentingnya koordinasi adalah adanya pemahaman dan persamaan persepsi dalam pelaksanaan koordinasi menjadi penting dalam upaya kesadaran akan pentingnya koordinasi.

- g. Kompetensi partisipan adalah adanya pihak-pihak yang berwenang yang terlibat dan mengawasi jalannya koordinasi.
- h. Kesepakatan, komitmen dan insentif koordinasi adalah memberikan pengaruh yang dapat membuat orang menjadi targetnya mengikuti dan menyetujui apa yang ditawarkan didalam kesepakatan tersebut dan intensif koordinasi adalah elemen atau balas jasa yang diberikan secara tidak tetap atau bersifat variabel tergantung pada prestasi kerja karyawan
- i. Kontinuitas koordinasi adalah kelanjutan dari suatu kegiatan yang dapat memberikan timbal balik terhadap apa yang telah dilaksanakan untuk perubahan lebih baik kedepannya.

E. Operasional Variabel

Variabel yang akan dianalisis dalam penelitian ini akan disajikan dalam bentuk tabel, yang dirancang untuk mendapat hasil penelitian yang akurat. Dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel II.1: Operasional Variabel Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Minas Kabupaten Siak

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penelitian	Skala
1	2	3	4	5
Tugas adalah suatu kegiatan pekerjaan khusus yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Stone (dalam Moekijat 1998;10)	Koordinasi	<p>1. Komunikasi</p> <p>2. Kesadaran Pentingnya Koordinasi</p> <p>3. Kompetensi Partisipan</p> <p>4. Kesepakatan, Komitmen, dan Insentif Koordinasi</p>	<p>a. Ada tidaknya informasi</p> <p>b. Ada tidaknya alur informasi</p> <p>c. Ada tidaknya teknologi informasi</p> <p>a. Tingkat pengetahuan pelaksanaan terhadap koordinasi</p> <p>b. Tingkat ketaatan terhadap hasil koordinasi</p> <p>a. Ada tidaknya pejabat yang berwenang terlibat</p> <p>b. Ada tidaknya ahli dibidang pembangunan yang terlibat</p> <p>a. Ada tidaknya bentuk kesepakatan</p> <p>b. Ada tidaknya pelaksana kegiatan</p> <p>c. Ada tidaknya sanksi bagi pelanggar kesepakatan</p> <p>d. Ada tidaknya insentif bagi</p>	<p>Baik Cukup Baik Kurang Baik</p> <p>Baik Cukup Baik Kurang Baik</p> <p>Baik Cukup Baik Kurang Baik</p> <p>Baik Cukup Baik Kurang Baik</p>

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penelitian	Skala
1	2	3	4	5
		5.Kontinuitas Koordinasi	<p>pelaksana koordinasi</p> <p>a. Ada tidaknya umpan balik dari obyek dan subyek pembangunan</p> <p>b. Ada tidaknya perubahan terhadap hasil kesepakatan</p>	Baik Cukup Baik Kurang Baik

F. Teknik Pengukuran

Untuk menjawab tujuan dalam penelitian tentang Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Minas Kabupaten Siak, maka dioperasionalkan konsep dan pengukuran dari indikator dalam penelitian ini dikelompokkan dalam 3 kategori yaitu Baik, Cukup Baik, Kurang Baik.

Variabel koordinasi, dengan indikator komunikasi, Kesadaran Pentingnya Koordinasi, Kompetensi Partisipan, Kesepakatan, Komitmen, dan Insentif Koordinasi, dan Kontinuitas Perencanaan. Dengan demikian kategori penilaian responden terhadap koordinasi adalah sebagai berikut:

Terlaksana :Apabila pelaksanaan tugas camat dalam mengkordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Minas Kabupaten Siak yang ditetapkan berada pada kategori 67%

Cukup Terlaksana :Apabila pelaksanaan tugas camat dalam mengorrndinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Minas Kabupaten Siak yang ditetapkan berada pada kategori 34%-66%

Kurang Terlaksana :Apabila pelaksanaan tugas camat dalam mengorrndinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Minas Kabupaten Siak yang ditetapkan berada pada kategori 33%

Selanjutnya untuk pengukuran masing-masing dari indikator pelaksanaan tugas camat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Komunikasi dikategorikan:

Terlaksana : Apabila komunikasi mengenai komunikasi langsung dan komunikasi tertulis yang ditetapkan berada pada 67%

Cukup Terlaksana : Apabila komunikasi mengenai komunikasi langsung dan komunikasi tertulis yang ditetapkan berada pada 34%-36%

Kurang Terlaksana : Apabila komunikasi mengenai komunikasi langsung dan komunikasi tertulis yang ditetapkan berada pada 33%

2. Kesadaran Pentingnya Koordinasi dikategorikan:

Terlaksana : Apabila kesadaran akan pentingnya koordinsi di tingkat pengetahuan pelaksanaan terhadap koordinasi dan tingkat ketaatan terhadap hasil koordinasi berada pada 67%

Cukup Terlaksana : Apabila kesadaran akan pentingnya koordinasi di tingkat pengetahuan pelaksanaan terhadap koordinasi dan tingkat ketaatan terhadap hasil koordinasi berada pada 34%-36%

Kurang Terlaksana : Apabila kesadaran akan pentingnya koordinasi di tingkat pengetahuan pelaksanaan terhadap koordinasi dan tingkat ketaatan terhadap hasil koordinasi berada pada 33%

3. Kompetensi Partisipan dikategorikan:

Terlaksana : Apabila Kompetensi Partisipan pejabat yang berwenang terlibat dan ahli dibidang pembangunan yang terlibat berada pada 67%

Cukup Terlaksana : Apabila Kompetensi Partisipan pejabat yang berwenang terlibat dan ahli dibidang pembangunan yang terlibat berada pada 34%-66%

Kurang Terlaksana : Apabila Kompetensi Partisipan pejabat yang berwenang terlibat dan ahli dibidang pembangunan yang terlibat berada pada 33%

4. Kesepakatan, Komitmen, dan Insentif Koordinasi dikategorikan

Terlaksana : Apabila kesepakatan, komitmen, dan insentif koordinasi berada pada 67%

Cukup Terlaksana : Apabila kesepakatan, komitmen, dan insentif koordinasi berada pada 34%-66%

Kurang Terlaksana : Apabila kesepakatan, komitmen, dan insentif koordinasi berada pada 33%

5. Kontinuitas Perencanaan dikategorikan:

Terlaksana : Apabila Kontinuitas Perencanaan umpan balik dari obyek dan subyek pembangunan dan perubahan terhadap hasil kesepakatan berada pada 67%

Cukup Terlaksana : Apabila Kontinuitas Perencanaan umpan balik dari obyek dan subyek pembangunan dan perubahan terhadap hasil kesepakatan berada pada 34%-66%

Kurang Terlaksana : Apabila Kontinuitas Perencanaan umpan balik dari obyek dan subyek pembangunan dan perubahan terhadap hasil kesepakatan berada pada 33%

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah survey deskriptif, yaitu dengan menggambarkan kenyataan yang terjadi dilapangan dengan apa adanya secara lebih detail mengenai suatu fenomena. Penggunaan tipe ini bertujuan untuk mengukur dengan cermat menggunakan metode kuantitatif melalui penggambaran yang sistematis mengenai fakta-fakta yang ada dalam penelitian ini. Survey dibatasi pada penelitian ini yang datanya dikumpul dari sampel yang mewakili seluruh populasi.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi dilakukannya penelitian ini adalah di Kecamatan Minas Kabupaten Siak. Karena wilayah Kecamatan Minas ini termasuk luas yang terdiri dari 4 Desa dan 1 Kelurahan. Maka alasan penulis melakukan penelitian di Kecamatan Minas ini dikarenakan masih kurangnya lahan yang diperlukan untuk mengembangkan kegiatan masyarakat, karena lahan tersebut masih milik chevron dan belum di hibahkan.

C. Populasi dan Sampel

Berhubungan dengan masalah penelitian diatas, maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Camat Minas, Sekretaris Camat, Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Lurah, dan masyaraka Kelurahan Minas Jaya. Untuk keterangan lebih jelas dapat dapat di lihat dari tabel berikut ini:

Tabel III.1.: Daftar Populasi dan Sampel Pada Penelitian Mengkoordinasi Tugas Camat di Kecamatan Minas

No	Nama Populasi	Populasi	Sampel	%
1	Camat Minas	1	1	100%
2	Sekretaris Camat	1	1	100%
3	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	1	1	100%
4	Kepala Desa	4	3	75%
5	Masyarakat Kecamatan Minas	29.072	98	0.34%
Jumlah		29.079	104	0.36%

D. Teknik Penarikan Sampel

Sampel adalah Sebagian dari populasi yang memiliki karakteristik yang relatif sama dan dianggap bisa mewakili populasi. Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh suatu populasi yang akan diteliti.

Teknik penarikan sampel yang di pergunakan penulis dalam penelitian ini bertitik tolak pada jumlah populasi yang dapat di jangkau oleh peneliti. Diambil dari seluruh populasi yang memungkinkan dapat menghasilkan pengumpulan data yang akurat. Teknik penarikan sampel yang digunakan untuk Camat, Sekretaris camat, dan Kepala seksi pemberdayaan masyarakat adalah teknik penarikan *sensus* yaitu, dengan penetapan seluruh populasi yang dijadikan sebagai sampel penelitian teknik ini digunakan karena jumlah sampelnya yang cukup kecil. Sedangkan untuk Lurah/ Kades dan Masyarakat Kecamatan Minas menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu karena jumlahnya yang besar dan disesuaikan dengan maksud penelitian.

E. Jenis Data dan Sumber

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden yang ada dilapangan mencakup dari hasil kuisisioner dan wawancara tentang Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Minas Kabupaten Siak.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak kedua seperti dari instansi yang menjadi tempat penelitian, yaitu Kantor Camat Minas Kabupaten Siak.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kuisisioner (angket) yaitu dengan membagikan beberapa daftar pertanyaan tertulis berdasarkan pilihan alternatif yang ada kepada responden meliputi penelitian yang dilakukan.
2. Dokumentasi yaitu melakukan pengumpulan data berdasarkan dokumen-dokumen yang berasal dari kantor Camat baik tertulis, gambar, maupun elektronik.
3. Wawancara yaitu dengan melakukan tanya jawab langsung kepada pihak Kecamatan sebagai responden.

4. Observasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap masalah-masalah yang dihadapi dilapangan

G. Teknik Analisis Data

Setelah semua data yang diperlukan dalam penelitian ini terkumpul, data tersebut akan diklasifikasikan menurut jenis dan bentuknya. Kemudian data dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan pendekatan analisis kualitatif yang menekankan pada pembangunan naratif atau deskriptif dalam Tuntunan Penulisan Tugas Akhir (Muslimin, 2016;46) dan kuantitatif untuk menjelaskan tentang Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Minas Kabupaten Siak.

H. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

Tabel III.3: Jadwal Mengkoordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Penelitian Pelaksanaan Tugas Camat Dalam

No	JenisKegiatan	BulandanMingguKe																							
		Septembe r				Oktober				Novemb er				Desembe r				Januari				Februari			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP	■	■	■	■																				
2	Seminar UP					■	■	■	■																
3	Revisi UP									■	■	■	■												
4	RevisiKuisione r													■	■	■	■								
5	Rekomendasi Survey																	■	■	■	■				
6	Survey Lapangan																					■	■	■	■
7	Analisis Data																								
8	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian (Skripsi)																								
9	Konsultasi Revisi Skripsi																								
10	Ujian Konferensif Skripsi																								
11	Revisi Skripsi																								
12	Penggandaan Skripsi																								

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Minas

1. Keadaan Geografis

Kecamatan Minas merupakan salah satu Kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Siak yang mempunyai luas wilayah 770 km, yang terdiri dari 1 Kelurahan dan 4 Desa. Pada tahun 2020 penduduk Kecamatan Minas mencapai 29.072 jiwa. Yang sebagian besar penduduknya tinggal di Kelurahan Minas Jaya sebanyak 44,25%, dan yang paling sedikit penduduk tinggal di Desa Rantau Bertuah sekitar 8,96%.

2. Keadaan Wilayah

Kecamatan Minas terdiri dari 1 Kelurahan dan 4 Desa, yaitu sebagai berikut:

1. Kelurahan Minas Jaya
2. Desa Minas Barat
3. Desa Minas Timur
4. Desa Mandiingin
5. Desa Rantau Bertuah

Letak dan luas Kecamatan Minas yaitu antara 100o54s'-101o34' BT, 0o40'-1o13 LU dengan luas wilayah sebesar 770 Km². Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Minas adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara: berbatasan dengan Kecamatan Sungai Mandau dan Kecamatan Kandis
2. Sebelah Selatan: berbatasan dengan Kota Pekanbaru
3. Sebelah Barat: berbatasan dengan Kecamatan Kandis dan Kabupaten Kampar
4. Sebelah Timur: berbatasan dengan Kecamatan Tualang dan Kecamatan Sungai Mandau.

Kantor Camat Minas juga mempunyai Visi dan Misi yaitu Visi “Terwujudnya kesejahteraan masyarakat serta pelayanan yang baik untuk tercapainya tujuan aparatur pemerintah yang berfungsi sebagai pelayanan masyarakat” dan Misi “1. Meningkatkan SDM bidang pendidikan, 2. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, 3. Meningkatkan sarana dan prasarana Kantor Camat Minas, 4. Pengembangan adat istiadat melayu sebagai nilai dasar & alat pemersatu warga (menuju visi Kab. Siak kedepan)”

a. Jumlah Penduduk

Kecamatan Minas terdiri dari 1 Kelurahan dan 4 Desa. Berikut ini adalah data jumlah penduduk Kecamatan Minas yang tersebar di dalam Kelurahan dan Desa:

Tabel IV.1. Data Jumlah Penduduk Kecamatan Minas Menurut KK dan Jenis Kelamin.

No	Kelurahan dan Desa	Jumlah KK		Jumlah	Jumlah Penduduk		Jumlah
		L	P	L+P	L	P	L+P
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Minas Jaya	3.244	207	3.451	7.129	6.769	13.898
2.	Minas Timur	728	197	925	1.999	2.336	4.335
3.	Minas Barat	1.195	15	1.210	2.904	2.624	5.528
4.	Mandiingin	669	31	700	1.504	1.295	2.799
5	Rantau Bertuah	464	32	296	1.279	1.233	2.512
Jumlah		6.300	482	6.782	14.815	14.257	29.072

Sumber: Kecamatan Minas 2020

Berdasarkan tabel diatas menjelaskan bahwa banyaknya jumlah penduduk menurut KK dan jenis kelamin yaitu, Minas Jaya berjumlah 3.451 KK dan 13.898 penduduk , Minas Timur berjumlah 925 KK dan 4.335 penduduk, Minas Barat berjumlah 1.210 KK dan 5.528 penduduk, Mandiingin 700 KK dan 2.799 penduduk, Rantau Bertuah 296 KK dan 2.512 penduduk. Dengan jumlah KK 6.782 dan 29.072 penduduk di Kecamatan Minas

b. Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk meningkatkan sumberdaya manusia yang lebih baik, maka dari itu diperlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai baik negeri maupun swasta. Tabel dibawah ini menunjukkan jumlah sarana pendidikan yang ada di Kecamatan Minas:

Tabel IV.3. Jumlah Sarana Pendidikan di Kecamatan Minas.

No.	Tingkat Pendidikan	Negeri	Swasta
1	2	3	4
1.	TK	-	5
2.	SD	12	4
3.	SMP	7	6
4.	SMA	2	1
5.	SMK	1	1
Jumlah		22	17

Sumber: Kecamatan Minas 2020

Berdasarkan data diatas menunjukkan jumlah sarana pendidikan di Kecamatan Minas dengan tingkat pendidikan sebagai berikut: TK negeri 0 swasta 5, SD negeri 12 swasta 4, SMP negeri 7 swasta 6, SMA negeri 2 swasta 1, SMK negeri 1 swasta 1. Dengan jumlah pendidikan negeri 22 dan swasta 12 di Kecamatan Minas.

B. Struktur Organisasi Kecamatan Minas

Sesuai Peraturan Bupati Siak Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten siak. Kecamatan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang di bentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kampung dan Kelurahan.

1. Susunan Organisasi Kecamatan Terdiri Dari:

- a. Camat
- b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Umum

2. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian

c. Seksi, meliputi:

1. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan
2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Kampung dan Kelurahan
3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
4. Seksi Kesejahteraan Sosial

Berikut ini penjelasan tugas dari masing-masing unsur organisasi yang ada di Kecamatan Minas.

1. Camat

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan menjelaskan bahwa tugas dan fungsi camat adalah sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan pegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tingkat Kecamatan

- g. Membina dan Mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur Desa
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain melaksanakan tugas diatas camata juga mendapat pelimpahan sebagai kewenangan bupati/walikota:

- a. Untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.
- b. Untuk melaksanakan tugas pembantuan.

2. Sekretariat

Sekretaris merupakan salah satu unsur penting dalam sebuah organisasi, sekretaris mempunyai tugas pokok membina dan melaksanakan urusan umum, penyusunan perencanaan, pengelolaan administrasi keuangan dan kepegawaian di lingkungan Pemerintahan Kecamatan. Selain itu sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan, aset daerah dan kepegawaian

- b. Penyelenggaraan urusan umum, urusan rumah tangga, perlengkapan dan pemeliharaan, keprotikilan dan hubungan masyarakat.
- c. Penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan ketatapustakaan
- d. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan sub bagian
- e. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan sub bagian
- f. Pengkoordinasi dan penyusunan rencana pembangunan bidang kecamatan, evaluasi dan pelaporan
- g. Pelaksanaan pembinaan, pengelolaan dan pengendalian administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, ketenagaan, kerumahtanggaan dan kelembagaan
- h. Pembagian tugas, pemberian petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- i. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada atasan
- j. Pelaksanaan fungsi yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan.

3. Subag Pelaksanaan dan Umum

Subag pelaksanaan dan umum juga mempunyai tugas dalam organisasi Kecamatan, yaitu sebagai berikut:

- a. Membantu sekretaris kecamatan dalam menjalankan tugas penyusunan rencana kegiatan, pengkoordinasian, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis dibidang pengelolaan urusan administrasi umum, kehumasan, perpustakaan dan kearsipan.
- b. Menyusun rencana kegiatan sub bagian Perencanaan dan Umum
- c. Menyeenggarakan dan menegendalikan administrasi umum dan perkantoran
- d. Melaksanakan kearsipan dan ekspedisi
- e. Mengelola perpustakaan, informasi dan dokumentasi
- f. Melaksanakan penyusunan bahas Rencana Strategis
- g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan
- h. Melaksanakan penyusunan bahan laporan akuntabilitas kinerja pemerintah
- i. Melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan RKA/DPA
- j. Melaksanakan inventarisasi permasalahan penyelenggaraan program dan kegiatan
- k. Mengevaluasi hasil program kerja
- l. Membimbing, mengendalikan dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dan upaya meningkatkan produktivitas kerja
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan baik secara tertulis maupun lisan.

4. Kepala Subbag Keuangan dan Kepegawaian

Adapun tugas subag keuangan dan kepegawaian adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana operasional program kerja sub bagian keuangan dan kepegawaian
- b. Menyiapkan bahan laporan bulanan, triwulan dan tahunan
- c. Mengumpulkan dan mengolah data laporan hasil kegiatan
- d. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan dan penyajian data statistik serta informasi
- e. Membuat daftar gaji dan melaksanakan penggajian
- f. Menyiapkan proses administrasi terkait penatausahaan keuangan daerah
- g. Menyiapkan pembukuan setiap transaksi keuangan pada buku kas umum
- h. Melaksanakan perbendaharaan keuangan
- i. Melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pembantu pemegang kas
- j. Mengajukan SPP untuk pengisian kas
- k. Memeriksa pembayaran gaji SKPP pegawai yang mutasi
- l. Mendistribusikan uang kerja kegiatan kepada pemegang kas sesuai dengan jadwal kegiatan
- m. Melaksanakan kegiatan meneliti, mengoreksi dan menandatangani surat pertanggung jawaban (SPJ) atas penerimaan dan pengeluaran kas

- n. Membuat laporan hasil kegiatan dan mengkoordinir laporan realisasi fisik dan keuangan
- o. Membimbing, mengendalikan serta mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja
- p. Mengelola administrasi aset daerah di lingkup tugasnya
- q. Mengelola rumah tangga, perlengkapan, dan penataan barang milik negara
- r. Mempersiapkan berkas usulan tanda jasa/bintang penghargaan/LP2P/LHKPN/LHKASN
- s. Mengelola administrasi kepegawaian pembinaan jabatan fungsional, dan evaluasi kinerja aparatur sipil negara
- t. Melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan dan pemeliharaan
- u. Mengelola sarana dan prasarana perkantoran
- v. Menyelenggarakan bahan evaluasi kinerja pegawai
- w. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan baik secara lisan maupun tulisan

5. Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan

Adapun tugas Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan adalah sebagai berikut:

- a. Membantu camat dalam membina, mengkoordinasi dan melaksanakan kegiatan pemerintahan umum tingkat kecamatan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kampung/kelurahan
- b. Menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan seksi pemerintahan dan pelayanan
- c. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang Pemerintahan dan Pelayanan
- d. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan pengoordinasian pengumpulan data yang berkaitan dengan perimbangan keuangan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan
- e. Melakukan pembinaan dan pengawasan serta evaluasi penyelenggaraan pemerintahan umum dan pemerintahan kampung/kelurahan
- f. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan
- g. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan bimbingan, pemberian petunjuk dan pengawasan pelaksanaan pemilihan penghulu
- h. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyiapan pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian penghulu dan perangkat kampung lainnya

- i. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dan pelayanan badan pertanahan/keagrariaan
- j. Membantu camat dalam penyelenggaraan kewenangan-kewenangan pemerintahan daerah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat dan tugas-tugas umum pemerintahan dalam lingkup pelayanan perizinan dan non perizinan
- k. Melaksanakan koordinasi dalam penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dengan perangkat daerah dan /atau instansi terkait lainnya
- l. Melaksanakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- m. Melakukan penyusunan standar pelayanan publik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- n. Melaksanakan tugas pembantuan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan serta legalisasi administrasi pertanahan sesuai kewenangannya
- o. Melakukan penerimaan, pemrosesan, penerbitan dan pembatalan perizinan dan non perizinan sesuai kewenangannya
- p. Melakukan pengolahan Surat Keterangan lainnya yang menjadi kewenangannya

- q. Menerima dan menindaklanjuti pengaduan/ keluhan dari masyarakat dengan melaksanakan koordinasi pemecahan permasalahan melalui sekretaris
- r. Melakukan pendistribusian dan pengumpulan formulir pengumpulan indeks kepuasan masyarakat yang berasal dari Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan pelayan publik
- s. Melaksanakan pelayanan umum di tingkat Kecamatan dibidang perizinan, non perizinan dan administratif lain sesuai kewenangannya mulai dari penerimaan dokumen/berkas permohonan dan penerbitan serta penyampaian kembali dokumen/berkas kepada pemohon
- t. Melaksanakan fasilitas, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayan kepada masyarakat
- u. Melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dari pelayanan umum yang menghasilkan pendapatan
- v. Melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
- w. Membantu menyusun program dan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil
- x. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan rencana kegiatan seksi pemerintahan serta menyiapkan tindak lanjut penyelesaian permasalahan

- y. Melakukan kerja sama dengan seksi-seksi pelayanan umum lainnya dalam pelaksanaan tugas
- z. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pemimpin baik secara tertulis maupun lisan

6. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Kepala seksi pemberdayaan masyarakat, kampung dan kelurahan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Membantu camat dalam membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat, kampung dan kelurahan
- b. Menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan seksi pemberdayaan masyarakat, kampung dan kelurahan
- c. Melaksanakan upaya-upaya peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum masyarakat perencanaan pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan
- d. Melaksanakan fasilitas, koordinasi dan pembinaan di bidang perekonomian, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, Kampung dan Kelurahan.
- e. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai

program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan

- f. Melaksanakan penyusunan profil Kecamatan.
- g. Melaksanakan pengevaluasian terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta
- h. Melakukan pembinaan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kampung (LPMK) bersama-sama dengan seksi-seksi pada unit kerja maupun Lembaga/ Dinas/ Instansi terkait.
- i. Melaksanakan fasilitas pengembangan lembaga kemasyarakatan.
- j. Melaksanakan fasilitas pelaksanaan pemberdayaan masyarakat kelurahan.
- k. Melaksanakan pengkoordinasian pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan.
- l. Melaksanakan pengkoordinasian pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaa, pementauan serta perindustrian, perdagangan, kepariwisataan, perkoperasian, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan golongan ekonomi lemah.
- m. Melaksanakan pengkoordinasian dan pengawasan penyelenggaraan pembangunan di wilayah kerjanya
- n. Melaksanakan fasilitasi pembangunan partisipatif
- o. Melaksanakan pembinaan lingkungan hidup

- p. Melaksanakan pengkoordinasian pengembangan perekonomian kelurahan di wilayah kerja
- q. Melaksanakan pengkoordinasian upaya peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam bidang pembangunan, peningkatan kualitas lingkungan dan permukiman
- r. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berubung dengan bidang tugas seksi pemberdayaan masyarakat dan kampung menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah
- s. Mengatur dan mendistribusikan pekerjaan
- t. Mengatur dan mengevaluasi tugas bawahan
- u. Memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya
- v. Membuat laporan pelaksanaan tugas program dan kegiatan kepada atasan
- w. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

7. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kepala seksi ketentraman dan ketertiban umum memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Membantu camat dalam membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas dibidang ketentraman dan ketertiban umum,

pembinaan kesatuan bangsa, organisasi kemasyarakatan serta perlindungan masyarakat

- b. Menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan seksi ketentraman dan ketertiban umum
- c. Menyelenggarakan pembinaan wawasan kebangsaan, perlindungan dan ketertiban masyarakat
- d. Melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penerapan dan penegakan peraturan erundang-undangan
- e. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi serta SKPD dan instansi lain (POLRI dan TNI) sserta pemuka agama mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- f. Melaksanakan koordinasi dan pembinaan kegiatan sosial politik, ideologi negara kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat
- g. Melaksanakan koordinasi dan pembinaan penanggulangan dan pencegahan bencana tingkat kecamatan
- h. Melakukan kerjasama dengan seksi pelayanan umum dan seksi-seksi lainnya dalam pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan pemberian rekomendasi di bidang perizinan
- i. Menyelenggarakan fasilitas pembinaan kerukunan antar umat beragama

- j. Menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat dibidang ketentraman dan ketertiban umum
- k. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas seksi ketentraman dan ketertiban dan menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah
- l. Mengatur dan mendistribusikan pekerjaan kepada bawahan
- m. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan
- n. Memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya
- o. Membuat laporan pelaksanaan tugas program dan kegiatan kepada atasan
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas

8. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial

Kepala seksi kesejahteraan sosial mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Membantu camat dalam membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas di bidang kesejahteraan sosial
- b. Menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan seksi kesejahteraan sosial
- c. Melaksanakan pembinaan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan kesenian rakyat

- d. Menyelenggarakan koordinasi pembinaan dan pengendalian keluarga berencana
- e. Menyelenggarakan koordinasi pembinaan dan pengembangan pemberdayaan perempuan, pemuda, dan olahraga, perlindungan anak dan kehidupan beragama serta organisasi sosial kemasyarakatan lingkup tugasnya
- f. Melaksanakan pembinaan di bidang sosial yang meliputi pengentasan kemiskinan, bantuan sosial serta bantuan korban bencana alam
- g. Menyelenggarakan pembinaan peningkatan partisipasi dan gotong royong masyarakat
- h. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesejahteraan sosial
- i. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya
- j. Mengatur dan mendistribusikan pekerjaan
- k. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan
- l. Memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya
- m. Membuat laporan pelaksanaan tugas program dan kegiatan kepada atasan

- n. Melaksanakan tugas lainyng diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun secara lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fugsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang disesuaikan dengan subjek penelitian yang diambil sebagai sampel dari sebagian jumlah populasi, yakni yang terdiri dari 1 orang camat, Sekretaris Camat, Kepala PMD, Kepala Desa, dan 98 orang masyarakat Kecamatan Minas.

Tabel berikut ini akan menjelaskan identitas responden berdasarkan umur, jenis kelamin dan tingkat pendidikan terakhir responden.

1. Identitas Responden Berdasarkan Umur

Dari hasil penyebaran angket yang berikan kepada 104 orang masyarakat Kecamatan Minas untuk mengisi koesioner, maka dikelompokkan salah satunya berdasarkan umur responden yaitu sebagai berikut:

Tabel V.1 Identitas Responden Berdasarkan Umur

No.	Kelompok Usia	Frekuensi	Persentase
1.	<19 Tahun	0	0%
2.	20-29 Tahuns	30	28,85%
3.	30-39 Tahun	33	31,74%
4.	>40 Tahun	41	39,43%
Jumlah		104	100%

Sumber: Hasil Olahan Data Penelitian, 2021

Dapat dilihat dari tabel V.I diatas bahwa jumlah responden yang berusia <19 tahun sebanyak 0 dengan persentase sebesar 0%, usia 20-29 tahun sebanyak 30 orang dengan persentase 33%, usia 30-39 tahun sebanyak 32 orang dengan besar persentase 33%, dan usia >40 sebanyak 36 orang dengan jumlah persentase 37%. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa dari tingkat usia yang dimiliki responden mampu memberikan tanggapan yang objektif karena responden sudah berada pada usia produktif dalam menilai pelaksanaan tugas camat dalam mengkoordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan minas .

2. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Untuk lebih memperjelas data identitas responden, maka penulis mengelompokkan berdasarkan jenis kelamin responden, yakni sebagai berikut:

Tabel V.2. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
1.	Laki-Laki	53	50,96%
2.	Perempuan	51	49,03%
Jumlah		104	100%

Sumber: Hasil Olahan Data Penelitian, 2021

Dapat dilihat dari tabel V.2. bahwa banyaknya responden berjenis kelamin laki-laki yaitu 53 orang dengan persentase sebesar 50,96%, dan jumlah responden perempuan sebanyak 51 orang dengan persentase 49,03%.

3. Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan sangat dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat, karena dengan adanya pendidikan membuat seseorang mempunyai pikiran yang luas dan terbuka didalam segala bidang. Untuk itu peneliti perlu mengetahui tingkat pendidikan responden dalam memberi penilaian, karena tingkat pendidikan sangat mempengaruhi cara berfikir dan analisis seseorang.

Dapat kita lihat pada tabel berikut ini tingkat pendidikan responden:

Tabel V.3. Identitas responden berdasarkan tingkat pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Persentase
1	SD	1	0,97%
2	SMP/Sederajat	13	12,5%
3	SMA/Sederajat	70	67,31%
4	Strata Satu (S.1)	19	18,27%
5	Strata Dua (S.2)	1	0,97%
Jumlah		104	100%

Sumber: Hasil Olahan Data Penelitian, 2021

Dari tabel di atas, dapat diketahui banyaknya responden dalam penelitian ini yaitu 104 orang dengan jumlah dan tingkatan yang berbeda. Diketahui sebanyak 1 orang dengan tingkat pendidikan SD atau sebesar 0,97%, responden yang memiliki tingkat pendidikan SMP/Sederajat sebanyak 13 orang atau sebesar 12,5%, responden yang memiliki tingkat pendidikan SMA/Sederajat sebanyak 70 orang atau sebesar 67,31%, yang tingkat pendidikan Strata Satu (S.1) sebanyak 19

orang dengan persentase 18,27%, dan yang responden yang memiliki tingkat pendidikan Strata Dua (S.2) sebanyak 1 orang dengan persentase 0,97%

B. Pembahasan Hasil Penelitian

Pembangunan adalah suatu perubahan yang terjadi secara sistematis dengan adanya perencanaan dan tujuan utama dilakukannya pembangunan tersebut agar memperoleh hasil yang maksimal. Dalam pelaksanaannya pembangunan harus mencakup dalam segala bidang, seperti politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan berguna untuk meningkatkan kemampuan nasional untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih maju dan sejahtera.

Pada hakikatnya pembangunan nasional merupakan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, maka diperlukan kerjasama kepada masyarakat dan adanya kebijakan publik agar pembangunan tersebut segera terwujud. Karena masih banyak ditemukan permasalahan yang berhubungan dengan dengan buruknya keadaan perekonomian masyarakat, minimnya pendidikan yang dimiliki masyarakat serta rendahnya kualitas kesehatan yang dimiliki. Oleh karena itu dengan adanya kebijakan yang diterapkan tersebut dapat membantu pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat agar menjadi sejahtera.

Dalam suatu daerah sangat perlu adanya pemberdayaan masyarakat yang merupakan salah satu dari fungsi pemerintahan. Untuk menjalankan fungsi tersebut pemerintah bekerja sama dengan perangkat-perangkat daerah dalam

menerapkan kebijakan yang telah dibuat. Daerah mempunyai kewenangan sendiri untuk membuat kebijakan dalam memberikan pelayanan serta memberdayakan masyarakatnya hal ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 yaitu tentang Pemerintah Daerah.

Dalam wilayah Kecamatan, Camat mempunyai tanggungjawab yang besar untuk wilayahnya, karena terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, salah satu tugas camat yaitu mengkoordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Tugas ini dilimpahkan langsung oleh Bupati/Walikota kepada Camat untuk diterapkan di wilayah kecamatan. Namun Dalam menjalankan tugasnya camat tidak sendiri, ia dibantu oleh sekretaris camat dan seksi-seksi pemerintahan lainnya salah satunya dalam mengkoordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat, agar setiap perencanaan kegiatan yang akan dilakukan berjalan sesuai tujuan.

Berdasarkan fakta yang terjadi dilapangan, peneliti melihat bahwa masih kurangnya koordinasi yang dilakukan camat dalam kegiatan pemberdayaan di Kecamatan Minas, contohnya seperti kurangnya sumberdaya manusia yang ahli dalam mengelola usaha dalam bidang ekonomi peoduktif, serta kurangnya lahan yang dimiliki oleh masyarakat untuk mengembangkan usahanya, sehingga hal ini sulit bagi masyarakat menjadi lebih berkembang.

Dalam penelitian ini, untuk lebih mengetahui Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Minas

Kabupaten Siak, maka dapat dianalisa dengan menggunakan beberapa indikator sebagai berikut.

1. Komunikasi

Komunikasi adalah suatu proses dalam menyampaikan pesan atau informasi yang mempunyai makna tertentu kepada seseorang atau kelompok lainnya dengan jelas dan relevan agar mendapatkan tanggapan yang baik. Komunikasi yang baik sangat diperlukan agar setiap kegiatan yang dijalankan terkoordinasi dengan baik, karena jika kurangnya komunikasi maka akan berdampak buruk pada kegiatan yang sudah direncanakan. Dalam penyampaian informasi ini sendiri, dapat dilakukan dengan dua cara yaitu secara lisan dan secara tulisan.

Pada indikator komunikasi terdapat 3 pertanyaan yang diajukan kepada responden. Berikut ini merupakan hasil dari tanggapan responden:

Tabel V.4 Tanggapan Responden Tentang Indikator Komunikasi

No.	Item Penilaian	Frekuensi Per Kategori			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	2	3	4	5	6
1.	Memberikan Informasi	46	53	5	104
2.	Memberikan Alur Informasi	36	60	8	104
3.	Memberikan Teknologi Informasi	49	49	6	104
Jumlah		131	162	19	312
Rata-rata		43,66	54	6,33	104
Persentase		42%	52%	6%	100%

Sumber: Hasil Olahan Data Penelitian, 2021

Berdasarkan data diatas, maka dapat diuraikan bahwa Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Minas Kabupaten Siak dalam berkomunikasi terkait kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang ekonomi produktif pada indikator komunikasi, tanggapan responden dalam memberikan informasi dalam kategori baik sebanyak 46 orang dengan persentase 44%, tanggapan responden dengan kategori cukup baik sebanyak 53 orang dengan persentase 51%, dan tanggapan responden dalam kategori kurang baik sebesar 5 orang dengan persentase 5%.

Untuk tanggapan responden dengan pertanyaan dalam memberikan alur informasi kegiatan pemberdayaan masyarakat dibidang ekonomi produktif di Kecamatan Minas Kabupaten Siak, responden memberikan tanggapan dengan kategori baik sebanyak 36 orang dengan persentase 34%, untuk tanggapan responden dengan kategori cukup baik sebanyak 60 orang dengan persentase sebesar 58%, dan untuk kategori kurang baik sebanyak 8 orang dengan persentase sebesar 8%.

Selanjutnya tanggapan responden dengan pertanyaan dalam meberikan teknologi informasi kegiatan pemberdayaan masyarakat dibidang ekonomi produktif di Kecamatan Minas Kabupaten Siak, responden memberikan tanggapan dengan kategori baik sebanyak 49 orang dengan persentase sebesar 47%, untuk tanggapan responden dengan kategori cukup baik sebanyak 49 orang dengan persentase sebesar 47%, dan untuk tanggapan responden dengan kategori kurang baik sebanyak 6 orang dengan persentase sebesar 6%.

Dari keseluruhan penilaian yang diberikan oleh responden pada indikator komunikasi maka dapat diambil kesimpulan bahwa jumlah responden dalam kategori baik sebanyak 131 orang dengan rata-rata 43,66 dan besarnya persentase 42%, jumlah responden dengan kategori cukup baik sebanyak 162 orang dengan rata-rata 54 dan besarnya persentase 52%, dan jumlah responden dengan kategori kurang baik sebanyak 19 orang dengan rata-rata 6,3 dengan besarnya persentase 6%.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan sekretaris camat Minas yaitu Ibu Husna yang bertempat di kantor Camat Minas pada tanggal 3 Maret 2021 mendapatkan informasi sebagai berikut:

“Dalam melakukan komunikasi kepada masyarakat terkait kegiatan pemberdayaan masyarakat ini, jika mempunyai waktu maka camat akan turun langsung kemasyarakat untuk menyampaikan informasi tersebut, tetapi jika tidak memungkinkan untuk turun langsung kelapangan maka saya akan memberikan informasi melalui kepala desa dan lurah pada setiap kelurahan dan desa, karena komunikasi sangat diperlukan dalam merealisasikan kegiatan.”

Dari keterangan yang diberikan oleh sekretaris camat diatas, menjelaskan bahwa komunikasi yang dilakukan camat terhadap masyarakat sudah cukup baik, akan tetapi fakta yang peneliti temukan dilapangan masih ada beberapa masyarakat yang tidak mengetahui tentang kegiatan pemberdayaan masyarakat dibidang ekonomi produktif, serta pengetahuan masyarakat yang masih minim

dalam mengelola usaha yang sudah diberikan bahkan masih ada perangkat desa yang belum begitu memahami tugasnya dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan tanggapan responden, hasil wawancara serta observasi yang dilakukan, maka dapat disimpulkan dalam indikator komunikasi pada penelitian Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasi Kegiatan Pemberdayaan di Kecamatan Minas Kabupaten Siak dapat dikategorikan **Cukup Baik** dengan persentase sebesar 52% dari 104 jumlah responden.

2. Kesadaran Pentingnya Koordinasi

Koordinasi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk menelaraskan dan menyeimbangkan dalam mengatur sebuah pekerjaan agar terlaksana secara sistematis. Koordinasi sangat berperan penting didalam sebuah organisasi, karena dalam sebuah organisasi banya kterjadi perbedaan pandangan, pendapat, serta pekerjaan, oleh sebab itu diperlukan adanya koordinasi untuk menyatukan perbedaan-perbedaan yang terjadi didalam sebuah organisasi. Koordinasi itu sendiri bertujuan untuk mengintegrasikan tujuan dan rencana kerja yang sudah ditetapkan sebelumnya agar terealisasikan, maka perlu adanya seorang pemimpin untuk megkoordinasikan setiap kegiatan yang akan dijalankan.

Seperti halnya dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Minas Kabupaten Siak, dalam indikator kesadaran pentingnya koordinasi terdapat 2 pertanyaan yang akan diajukan kepada responden. Berikut ini hasil tanggapan responden terkait indikator kesadaran pentingnya koordinasi:

Tabel V.5. Tanggapan Responden Tentang Kesadaran Tentang Pentingnya Koordinasi

No.	Item Penilaian	Frekuensi Per Kategori			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	2	3	4	5	6
1.	Pengetahuan Pelaksanaan Terhadap Koordinasi	40	58	6	104
2.	Ketaatan Terhadap Hasil Koordinasi	47	54	3	104
Jumlah		87	112	9	208
Rata-rata		43,5	56	4,5	104
Persentase		42%	54%	4%	100%

Sumber: Hasil Olahan Data Penelitian, 2021

Berdasarkan data diatas, maka dapat diuraikan bahwa Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Minas dalam indikator kesadaran pentingnya koordinasi terkait kegiatan pemberdayaan masyarakat dibidang ekonomi produktif, tanggapan responden dengan pertanyaan pengetahuan pelaksanaan terhadap koordinasi dalam kategori baik sebanyak 40 orang dengan persentase sebesar 38%, tanggapan responden dalam kategori cukup baik sebanyak 58 orang dengan persentase sebesar 56%, dan tanggapan responden dalam kategori kurang baik sebanyak 6 orang dengan persentase sebesar 6%.

Sedangkan tanggapan responden dengan pertanyaan ketaatan terhadap hasil koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat dibidang ekonomi produktif di Kecamatan Minas Kabupaten Siak, responden yang memberikan tanggapan dengan kategori baik sebanyak 47 orang dengan persentase sebesar 45%, responden yang memberikan tanggapan dengan kategori cukup baik sebanyak 54

orang dengan persentase 52%, dan responden yang memberikan tanggapan dengan kategori kurang baik sebanyak 3 orang dengan persentase sebesar 3%.

Dari keseluruhan tanggapan responden pada indikator kesadaran pentingnya koordinasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang ekonomi produktif di Kecamatan Minas Kabupaten Siak, maka dapat disimpulkan bahwa jumlah responden dengan kategori baik sebanyak 87 orang dengan rata-rata 43,5 dan besarnya persentase 42%, jumlah responden dengan kategori cukup baik sebanyak 112 orang dengan rata-rata 56 persentase sebesar 54%, dan jumlah responden dengan kategori kurang baik sebanyak 9 orang dengan rata-rata 4,5 dan persentase sebesar 4%.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan sekretaris camat ibu Husna yang bertempat di kantor camat minas pada tanggal 3 Maret 2021 mendapatkan informasi sebagai berikut:

“Untuk menjalankan setiap kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan maka diperlukan adanya koordinasi, dalam hal ini camat berkoordinasi kepada setiap kepala desa/lurah dalam memberitahukan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan, agar desa/ dan kelurahan menyampaikan kepada masyarakat untuk ikut serta dalam setiap kegiatan yang telah direncanakan tersebut”

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan dilapangan, dalam indikator kesadaran pentingnya koordinasi secara keseluruhan sudah terlaksana, namun belum sepenuhnya karena masih terdapat beberapa masyarakat dan perangkat desa

yang kurang menyadari pentingnya dilakukan koordinasi dan belum mengetahui bagaimana bentuk dari kegiatan pemberdayaan yang akan dilakukan di Kecamatan Minas Kabupaten Siak.

Berdasarkan tanggapan responden, hasil wawancara serta observasi yang dilakukan, maka dapat disimpulkan dalam indikator kesadaran pentingnya koordinasi pada penelitian Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasi Kegiatan Pemberdayaan di Kecamatan Minas Kabupaten Siak dapat dikategorikan **Cukup Baik** dengan persentase sebesar 54% dari 104 orang jumlah responden.

3. Kompetensi Partisipan

Kompetensi partisipan adalah sebuah proses dimana pihak-pihak yang berwenang ikut serta dan terlibat dalam suatu organisasi dalam mewujudkan pembangunan dan memberikan masukan yang diperlukan serta mengawasi jalannya koordinasi yang bertujuan mewujudkan perencanaan yang sudah menjadi tanggungjawab bersama sesuai dengan tugas dan kewajibannya. Dalam penelitian ini camat berperan dalam mewujudkan pembangunan pada kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Minas Kabupaten Siak.

Pada indikator kompetensi partisipan terdapat 2 pertanyaan yang diajukan kepada responden terkait dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Minas Kabupaten Siak, sebagai berikut:

Tabel V.6. Tanggapan Responden Tentang Kompetensi Partisipan

No.	Item Penilaian	Frekuensi Per Kategori			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	2	3	4	5	6
1.	Ada tidaknya pejabat yang berwenang terlibat	36	62	6	104
2.	Ada tidaknya ahli dibidang pembangunan terlibat	32	67	5	104
Jumlah		68	129	11	208
Rata-rata		34	64,5	5,5	104
Persentase		33%	62%	5%	100%

Sumber: Hasil Olahan Data Penelitian, 2021

Dari data diatas, dapat diuraikan bahwa tanggapan yang diberikan oleh responden tentang ada tidaknya pejabat yang berwenang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Minas Kabupaten Siak di bidang ekonomi produktif, responden memberikan tanggapan dengan kategori baik sebanyak 36 orang dengan persentase sebesar 34%, responden dengan kategori cukup baik sebanyak 62 orang dengan persentase sebesar 60%, responden dengan kategori kurang baik sebanyak 6 orang dengan persentase sebesar 6%.

Selanjutnya tanggapan responden dengan pertanyaan ada tidaknya ahli dibidang pembangunan terlibat pada kegiatan pemberdayaan masyarakat dibidang ekonomi produktif di Kecamatan Minas Kabupaten Siak, responden yang memberikan tanggapan pada kategori baik sebanyak 32 orang dengan persentase 31%, responden yang memberikan tanggapan pada kategori cukup baik sebanyak 67 orang dengan persentase 64%, dan responden yang memberikan tanggapan pada kategori kurang baik sebanyak 5 orang dengan persentase 5%.

Dari keseluruhan tanggapan yang diberikan responden dalam indikator kompetensi partisipan, maka dapat disimpulkan bahwa jumlah responden dengan kategori baik sebanyak 68 orang dengan rata-rata 34 dan persentase sebesar 33%, jumlah responden dengan kategori cukup baik sebanyak 129 orang dengan rata-rata 64,5 dan persentase sebesar 62%, dan jumlah responden dengan kategori kurang baik sebanyak 11 orang dengan rata-rata 5,5 dan persentase 5%.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan sekretaris camat ibu Husna yang bertempat di kantor camat minas pada tanggal 3 Maret 2021 mendapatkan informasi sebagai berikut:

“Pada kegiatan pemberdayaan sangat diperlukan adanya partisipasi, dalam hal ini camat ikut serta dalam pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Minas. Dalam berpartisipasi camat menjalankan tugasnya sesuai pada tupoksi camat yang diberikan oleh Bupati, salah satunya camat melakukan perencanaan dan memberikan pelatihan kepada masyarakat melalui desa untuk mengembangkan pengetahuan serta melatih keterampilan masyarakat dalam bidang ekonomi produktif”

Sedangkan yang peneliti lihat pada hasil observasi di Kecamatan Minas Kabupaten Siak pada indikator kompetensi partisipan masih belum berjalan dengan maksimal masih, namun secara keseluruhan sudah tetap terlaksana. Agar lebih maksimal maka diperlukan kesadaran yang tinggi terhadap tugas dan fungsi masing-masing dan lebih meningkatkan kerjasama antara atasan dan bawahan agar kegiatan berjalan dengan efektif.

Berdasarkan tanggapan responden, hasil wawancara serta observasi yang dilakukan, maka dapat disimpulkan dalam indikator kompetensi partisipansi pada penelitian Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasi Kegiatan Pemberdayaan di Kecamatan Minas Kabupaten Siak dapat dikategorikan **Cukup Baik** dengan persentase sebesar 62% dari 104 orang jumlah responden

4. Kesepakatan, Komitmen, dan Insentif Koordinasi

Kesepakatan merupakan sebuah perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak secara resmi sebelum memulai suatu pekerjaan yang melibatkan kedua pihak dengan memberikan sanksi-sanksi tertentu sesuai dengan yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Komitmen adalah suatu ikatan yang dibuat dalam organisasi terhadap individu tentang rasa tanggungjawab terhadap tugas yang dimiliki individu tersebut terhadap pekerjaannya. Komitmen ini tercipta setelah adanya kesepakatan yang dibuat.

Insentif koordinasi yaitu balas jasa yang diberikan secara khusus yang diberikan kepada pekerja atas prestasi yang sudah diraih selama bekerja, maka pekerja tersebut akan diberikan penghargaan dalam bentuk uang, barang, atau yang lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas kerja pegawainya.

Dalam indikator kesepakatan, komitmen dan insentif pegawai terdapat 4 pertanyaan yang diajukan kepada responden terkait kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Minas Kabupaten Siak, yaitu sebagai berikut:

Tabel V.7. Tanggapan Responden Tentang Kesepakatan, Komitmen, dan Insentif Koordinasi

No.	Item Penilaian	Frekuensi Per Kategori			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	2	3	4	5	6
1.	Ada Tidaknya Bentuk Kesepakatan	44	53	7	104
2.	Ada Tidaknya Pelaksana Kegiatan	37	61	6	104
3.	Ada Tidaknya Sanksi Bagi Pelanggar Kesepakatan	46	54	4	104
4.	Ada Tidaknya Insentif Bagi Pelaksana Koordinasi	39	59	6	104
Jumlah		166	227	23	416
Rata-rata		41,5	56,75	5,75	104
Persentase		40%	55%	5%	100%

Sumber: Hasil Olahan Data Penelitian, 2021

Berdasarkan data diatas, dapat diuraikan bahwa Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Minas Kabupaten Siak dalam indikator kesepakatan, komitmen, dan insentif koordinasi tentang kegiatan pemberdayaan masyarakat dibidang ekonomi produktif, tanggapan responden dengan pertanyaan ada tidaknya bentuk kesepakatan dalam kategori baik sebanyak 44 orang dengan persentase sebesar 42%, tanggapan responden dengan kategori cukup baik sebanyak 53 orang dengan persentase sebesar 51%, dan tanggapan responden dengan kategori kurang baik sebanyak 7 orang dengan persentase sebesar 7%.

Untuk tanggapan responden dengan pertanyaan ada tidaknya pelaksana kegiatan pada kegiatan pemberdayaan masyarakat dibidang ekonomi produktif di Kecamatan Minas Kabupaten Siak, responden memberikan tanggapan dengan kategori baik sebanyak 37 orang dengan persentase sebesar 35%, yang memberikan tanggapan dengan kategori cukup baik sebanyak 61 orang dengan persentase 59%, dan responden yang memberikan tanggapan dengan kategori kurang baik sebanyak 6 orang dengan persentase sebesar 6%

Selanjutnya tanggapan responden dengan pertanyaan ada tidaknya sanksi bagi pelanggar kesepakatan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dibidang ekonomi produktif di Kecamatan Minas Kabupaten Siak, responden memberikan tanggapan dengan kategori baik sebanyak 46 orang dengan persentase sebesar 44%, responden yang memberikan tanggapan dengan kategori cukup baik sebanyak 54 orang dengan persentase sebesar 52%, dan responden yang memberikan tanggapan dengan kategori kurang baik sebanyak 4 orang dengan persentase sebesar 4%.

Sedangkan tanggapan responden dengan pertanyaan ada tidaknya insentif bagi pelaksana koordinasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang ekonomi produktif di Kecamatan Minas Kabupaten Siak, responden memberikan tanggapan dengan kategori baik sebanyak 39 orang dengan persentase sebesar 37%, responden yang memberikan tanggapan dengan kategori cukup baik sebanyak 59 orang dengan persentase sebesar 57%, dan responden yang memberikan tanggapan dengan kategori kurang baik sebanyak 6 orang dengan persentase sebesar 6%.

Dari keseluruhan tanggapan yang diberikan responden pada indikator kesepakatan, komitmen dan insentif koordinasi, maka dapat disimpulkan bahwa jumlah responden dengan kategori baik sebanyak 166 orang dengan rata-rata 41,5 dan persentase sebesar 40%, jumlah responden dengan kategori cukup baik sebanyak 227 orang dengan rata-rata 56,75 dan persentase sebesar 55%, dan jumlah responden dengan kategori kurang baik sebanyak 23 orang dengan rata-rata 5,75 dan persentase sebesar 5%.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan sekretaris camat ibu Husna yang bertempat di kantor camat minas pada tanggal 3 Maret 2021 mendapatkan informasi sebagai berikut:

“Adanya kesepakatan, komitmen serta insentif koordinasi dalam setiap kegiatan itu sangat diperlukan, karena dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat ini perlu adanya kesepakatan diawal agar setiap kegiatan yang berjalan nantinya tidak diluar dari yang sudah disepakati. Begitu juga dengan komitmen, setiap pegawai harus memegang komitmen dalam pekerjaannya sebagai rasa tanggungjawab terhadap tugas yang diberikan. Untuk insentif itu sendiri kecamatan akan memberikan reward kepada setiap desa yang mempunyai prestasi agar lebih meningkatkan kreativitas ang mereka miliki.”

Dari keterangan yang diberikan diatas dalam indikator kesepakatan, komitmen, dan insentif koordinasi pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Minas Kabupaten Siak sudah dinilai cukup baik, untuk lebih maksimal lagi pihak

kecamatan sebaiknya meningkatkan kesepkatan yang telah tditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan tanggapan responden, hasil wawancara serta observasi yang dilakukan, maka dapat disimpulkan dalam indikator kesepkatan, komitmen dan insentif koordinasi pada penelitian Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasi Kegiatan Pemberdayaan di Kecamatan Minas Kabupaten Siak dapat dikategorikan **Cukup Baik** dengan persentase sebesar 55% dari 104 orang jumlah responden

5. Kontinuitas Perencanaan

Kontinuitas perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan selanjutnya dan menetapkan kebijakan-kebijakan untuk tercapainya tujuan yang ingin diwujudkan dalam sebuah organisasi. Karena perencanaan sangat diperlukan dalam menentukan tindakan agar tidak menjadi salah langkah. Dalam hal ini camat berperan dalam melakukan perencanaan pada kegiatan pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi produktif di Kecamatan Minas Kabupaten Siak agar setiap kegiatan berjalan dengan baik sebagaimana yang telah direncanakan.

Tabel V.8. Tanggapan Responden Tentang Kontinuitas Perencanaan

No.	Item Penilaian	Frekuensi Per Kategori			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	2	3	4	5	6
1.	Ada Tidaknya Timbal Balik Dari Objek dan Subjek	47	54	3	104

No.	Item Penilaian	Frekuensi Per Kategori			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	2	3	4	5	6
	Pembangunan				
2.	Ada Tidaknya Perubahan Terhadap Hasil Kesepakatan	44	55	5	104
	Jumlah	91	109	8	208
	Rata-rata	45,5	54,5	4	104
	Persentase	44%	52%	4%	100%

Sumber: Hasil Olahan Data Penelitian, 2021

Berdasarkan data diatas, dapat diuraikan bahwa tanggapan yang diberikan oleh responden pada pertanyaan ada tidaknya timbal balik dari objek dan subjek pembangunan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang ekonomi produktif di Kecamatan Minas Kabupaten Siak, responden yang memberi tanggapan dengan kategori baik sebanyak 47 orang dengan persentase sebesar 45%, responden yang memberi tanggapan dengan kategori cukup baik sebanyak 54 orang dengan persentase sebesar 52%, dan responden yang memberi tanggapan dengan kategori kurang baik sebanyak 3 orang dengan persentase sebesar 3%.

Sedangkan tanggapan responden dengan pertanyaan ada tidaknya perubahan terhadap hasil kesepakatan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang ekonomi produktif di Kecamatan Minas Kabupaten Siak, responden yang memberikan tanggapan dengan kategori baik sebanyak 44 orang dengan persentase sebesar 42%, responden yang memberikan tanggapan cukup baik sebanyak 55 orang dengan persentase sebesar 53%, dan responden yang

memberikan tanggapan dengan kategori kurang baik sebanyak 5 orang dengan persentase sebesar 5%.

Dari keseluruhan tanggapan yang diberikan responden pada indikator kontinuitas perencanaan, maka dapat disimpulkan bahwa jumlah responden dengan kategori baik sebanyak 91 orang dengan rata-rata 45,5 dan persentase sebesar 44%, jumlah responden dengan kategori cukup baik sebanyak 109 orang dengan rata-rata 54,5 dan persentase sebesar 52%, dan jumlah responden dengan kategori kurang baik sebanyak 8 orang dengan rata-rata 4 dan persentase sebesar 4%.

Berdasarkan tanggapan responden pada indikator kontinuitas perencanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Minas Kabupaten Siak termasuk dalam kategori cukup terlaksana, karena kegiatan tersebut sudah direncanakan sebelumnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan sekretaris camat Minas yaitu Ibu Husna yang bertempat di kantor Camat Minas pada tanggal 3 Maret 2021 mendapatkan informasi sebagai berikut:

“Untuk membantu perencanaan setiap tahun Kecamatan melakukan musrembang kemudian disesuaikan dengan visi misi Presiden, Gubernur dan Bupati agar sejalan dengan perencanaan desa. Kerena untuk pemberdayaan pada setiap tahunnya mendapat instruksi dan arahan-arahan dari Presiden, Gubernur dan Bupati. Untuk saat ini Kecamatan sedang mengupayakan pemberdayaan 60% dari APBDes”

Dari keterangan yang diberikan diatas kontinuitas perencanaan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Minas Kabupaten Siak sudah dinilai cukup baik, begitu juga dengan fakta yang peneliti lihat dilapangan, tahapan perencanaan yang ada pada setiap desa sudah cukup tersusun dalam perencanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat sehingga setiap langkah dalam kegiatan menjadi lebih terarah, alangkah baiknya lagi setiap perencanaan yang dibuat melibatkan seluruh pegawai yang ada di kecamatan, agar setiap pegawai mengetahui bagaimana bentuk perencanaan yang akan dijalankan.

Berdasarkan tanggapan responden, hasil wawancara serta observasi yang dilakukan, maka dapat disimpulkan dalam indikator kontinuitas perencanaan dalam Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Minas Kabupaten Siak dapat dikategorikan Cukup Baik dengan persentase 52% dari 104 orang jumlah responden.

Dari uraian dan penjelasan kelima indikator yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu tentang Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Minas Kabupaten Siak, maka peneliti merkapitulasi tanggapan yang diberi oleh responden. Dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V.9. Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Minas Kabupaten Siak

No.	Indikator	Frekuensi Per Kategori			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	2	3	4	5	6
1.	Komunikasi	43,6 (42%)	54 (52%)	6,33 (6%)	104
2.	Kesadaran Pentingnya Koordinasi	43,5 (42%)	56 (54%)	4,5 (4%)	104
3.	Kompetensi Partisipan	34 (33%)	64,5 (62%)	5,5 (5%)	104
4.	Kesepakatan, Komitmen, dan Insentif Koordinasi	41,5 (40%)	56,75 (55%)	5,75 (5%)	104
5.	Kontinuitas Perencanaan	45,5 (44%)	54,5 (52%)	4 (4%)	104
Jumlah		208,1	285,75	26,08	520
Rata-rata		42	57	5	104
Persentase		40%	55%	5%	100%

Sumber: Hasil Olahan Data Penelitian, 2021

Berdasarkan data yang telah direkapitulasi diatas menjelaskan bahwa Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Minas Kabupaten Siak yang dinilai dari indikator komunikasi, kesadaran pentingnya koordinasi, kompetensi partisipan, kesepakatan komitmen dan insentif, dan kontinuitas perencanaan melalui tanggapan yang diberikan oleh responden secara keseluruhan berada dalam kategori **cukup baik** dengan jumlah rata-rata 57 dan persentase sebesar 55%. Tanggapan yang telah diberikan responden untuk seluruh kategori ini dianggap sudah dapat mewakili warga di Kecamatan Minas dalam memberi penilaian terhadap

Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Minas Kabupaten Siak, sehingga dapat disimpulkan bahwa tugas camat tersebut sudah cukup maksimal. Maka pada hasil penelitian ini dapat dikategorikan dalam kategori cukup baik pada skor 34%-66%.

Namun berdasarkan fakta yang terlihat dilapangan untuk Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Minas Kabupaten Siak di bidang ekonomi produktif sudah terlaksana walaupun masih ada kendala yang terjadi sehingga kegiatan belum maksimal.

C. Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Minas Kabupaten Siak

Dari keseluruhan tanggapan responden serta hasil observasi yang peneliti lakukan Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Minas Kabupaten Siak bidang ekonomi produkti sudah dinilai cukup baik, namun dalam pelaksanaan program tersebut masih terdapat beberapa hambatan-hambatan yang mengakibatkan program yang telah direncanakan tidak terlaksana dengan maksimal.

Berikut ini merupakan faktor-faktor yang menjadi penghambat bagi camat dalam menjalankan tugasnya pada kegiatan pemberdayaan masyarakat:

1. Berdasarkan informasi yang peneliti dapat melalui wawancara bersama ibu Husna sebagai sekretaris camat, adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat yaitu sebagai

berikut:“Masih kurangnya semangat masyarakat untuk mengetahui bagaimana cara melakukan kegiatan pemberdayaan dibidang ekonomi produktif ini, bukan hanya minim soal pengetahuan tetapi juga tidak adan kemauan untuk lebih berusahan mengembangkan apa yang sudah diberikan, sehingga kegiatan tidak berjalan dengan maksimal. Seharusnya masyarakat lebih memfokuskan dirinya agar program ini dapat berjalan maksimal”. Dalam menjalankan program pemberdayaan masyarakat ini,sangat diperlukan partisipasi dari berbagai pihak, baik Kecamatan, desa maupun masyarakat agar kegiatan berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan. Karena kurangnya partisipasi dari masyarakat sehingga sulit untuk mendapatkan sumber daya manusia untuk menjalankan program ini, karena masih ditemukan masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi dalam program pemberdayaan ini.

2. Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan di lapangan, yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masih kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak Kecamatan dalam melaksanakan program kegiatan pemberdayaan masyarakat. Karena dalam pelaksanaan program tersebut masih ada perangkat desa serta masyarakat yang belum berperan sesuai dengan tugas dan fungsi yang ditetapkan karena kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Kecamatan, sehingga kegiatan tidak berjalan dengan maksimal
3. Dari hasil observasi yang peneliti lakukan di Kecamatan Minas, yang menjadi faktor penghambat dalam menjalankan kegiatan pemberdayaan

masyarakat yaitu koordinasi yang dilakukan oleh Camat kepada perangkat-perangkat desa dan masyarakat masih belum maksimal, sehingga membuat kegiatan tersebut tidak terkoordinasi dengan baik.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian serta analisis yang peneliti lakukan di lapangan yaitu tentang Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Minas Kabupaten Siak maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Minas Kabupaten Siak yang diuraikan dalam indikator komunikasi, kesadaran pentingnya koordinasi, kompetensi partisipan, kepakatan, komitmen dan insentif koordinasi, serta kontinuitas koordinasi secara keseluruhan berada dalam kategori cukup baik yaitu dengan jumlah rata-rata 57 dan persentase sebesar 55%. Karena dalam pelaksanaannya memberi perubahan yang cukup baik terhadap kehidupan masyarakat menjadi lebih sejahtera.
2. Pada Pelaksanaan Tugas Camat Tugas Camat Dalam Mengkoordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Minas Kabupaten Siak di bidang ekonomi produktif masih terdapat beberapa hambatan seperti, masih kurangnya koordinasi yang dilakukan, sehingga kegiatan setiap kegiatan tidak terkoordinasi dengan baik. Kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh kecamatan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di lapangan. Belum maksimalnya koordinasi yang dilakukan camat dengan

perangkat desa terkait program pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

B. Saran

Dalam penelitian ini penulis memberikan saran agar Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Minas Kabupaten Siak agar menjadi lebih baik dan terlaksana dengan maksimal. Berikut ini sarang yang penulis berikan:

1. Untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat, pihak kecamatan sebaiknya melakukan pelatihan terhadap masyarakat untuk memberi masukan serta pengetahuan, agar masyarakat mempunyai kemampuan untuk ikut serta dalam program pemberdayaan yang dilakukan oleh kecamatan, sehingga dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas.
2. Untuk memastikan bahwa kegiatan pemberdayaan ini berjalan sesuai dengan yang direncanakan, pihak kecamatan sebaiknya turun langsung kelapangan untuk melihat kondisi serta perkembangan program yang sedang dijalankan, serta melakukan evaluasi terhadap hasil kerja yang sudah diselesaikan.
3. Agar koordinasi yang dilakukan dapat berjalan dengan baik, maka setiap pihak yang terkait dalam program ini harus mempunyai komunikasi yang dan hubungan kerja yang baik, sehingga apapun bentuk kegiatan yang

dilakukan dapat disepakati bersama dan tidak terjadi kurangnya komunikasi antara pihak-pihak yang saling berhubungan.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku-Buku

Adam Kuper & Jesica Kuper. 2000, *Ensiklopedi Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Rajawali Press

Agustino. Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta

Dharmawan, Arya Hadi. 2008, *Kelembagaan dan Tata Pemerintahan Kecamatan*. Project Working Paper No. 07, Bogor.

Donnelly, Gibson, dan Ivancevich. 1996. *Manajemen Edisi Sembilan Jilid Satu*. Alih Bahasa: Zuhad Ichyaudin. Jakarta Erlangga.

Hamdi, Muchlis. 2014. *Kebijakan Publik (Sebuah Tinjauan Filosofis)*. Yogyakarta, Ar-Ruzz Media.

Handyaningrat, Soewarno. 1989, *Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: Haji Masagung

Handyaningrat, Soewarno. 2002. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Haji Masagung.

Hasibuan. Malayu S.P. 2006. *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*, Edisi Revisi, Cetakan Ketujuh. (Jakarta: Bumi Aksara)

Hasibuan. Malayu S.P. 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Manajemen. Cetakan Keduapuluh Tiga*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Islami, M. Irfan. 2004. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kaloh, J. 2010. *Kepemimpinan Kepala Daerah*. Jakarta, Sinar Grafika
- Kuper. 2000. *Ensiklopedi Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Rajawali Press
- Labolo, Muhadam. 2011. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta, Rajawali Pers.
- Maksudi, Beddy Irawan. 2017, *Dasar-Dasar Administrasi Publik*. Cimande Hilir. Bogor: PT. Raja Grafindo.
- Mardikanto. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Moekijat. 1998. *Perencanaan dan Pengembangan Karir Pegawai*. Bandung, Ramaja Rosdkarya.
- Munaf, Yusri. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Marpyan Damai
- Nawawi, Hadari. 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis yang Kompetitif*. Gajah Mada University Press, Yogyakarta
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan)*. Jakarta, Rineka Cipta.
- Ndraha, Taliziduhu. 2010. *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta, Rineka Cipta

- Ndraha, Taliziduhu. 2011. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan 1)*. Jakarta, Rineka Cipta.
- Pasalong, Harban. 2013. *Kepemimpinan Birokrasi*. Bandung, Alfabeta.
- Sholeh, Chabib. 2014, *Dialetika Pembangunan dan Peberdayaan*. Bandung: Fokus Media.
- Sinambela, Lijan Poltak. 2006, *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiono.2009, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R&D*. Bandung, Alfabota.
- Sumaryadi, I Nyoman. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta, Citra Utama.
- Sumaryo, Gitisaputro dan Kardiyana K. Ranga. 2015, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, Konsep, Teori dan Aplikasinya di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Surbakti, Irfan. 2002, *Sistem Pendukung Keputusan (Decision Support Sytem)*. Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Sutarto. 2006. *Dasar-Dasar Organisasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Syafiie, Inu Kencana. 1999. *Teori dan Analisis Politik Pemerintahan*. Jakarta: Pertja

Syafii, Inu Kencana. 2007. *Pengantar Filsafat*. Bandung, Refika Asitama

Syafiie, Inu Kencana. 2013, *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Wahab, Solichin Abdul.2004. *Analisis Kebijakan: Dari Formulas Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta, Bumi Aksara.

Wibawa, Samodra. 2011. *Politik Perumusan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Widjaja. H.A.W. 2003. *Otonomi Desa*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Widjaja. H.A.W. 2011. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Terry, George dan Leslie W. 2010. *Dasar-Dasar Manajemen*. Cetakan Kesebelas, Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Thoha, M. 2006, *Perilaku Organisasi*. Jakarta, Rajawali Press.

Jurnal:

Drs. Mangasi Pangabean. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan: Dunia Ilmu*, 1 (1).

Alwein Majampoh, Joyce J. Rares dan Helly Kolondam. *Peranan Camat Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Rainis Kabupaten Kepulauan Taulad*.

Reynald Prasatya, Ronny Gosal, Welly Waworundeng. 2019. *Koordinasi Camat Dakam Pemberdayaan Masyarakat*. Jurusan Ilmu Pemerintahan

Tegila Rahmat. *Peranan Camat Sebagai Koordinator Dalam Menunjang Keberhasilan Pembangunan Fisik di Kecamatan Bolangitang Kabupaten Bolang Mongondow Utara*. Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT.

Saroinsong Nitreesilia, Hanny Posumah, Alden Laloma. *Koordinasi Camat Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara*.

Noor Munawar .2011. *Pemberdayaan Masyarakat*. Dalam: Jurnal Ilmiah CIVIS. Volume I, No 2, Juli.

Majaampoh, Alwein, Joyce J. Rayes, Helly Kolondom. *Peranan Camat Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Rainis Kabupaten Kepulauan Talaud*.

Dokumentasi

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintahan Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan

Peraturan Bupati Siak 8 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Siak



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 اَلْمَدِيْنَةُ اَلْمَدِيْنَةُ

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI SKRIPSI

Nomor : 1523 /A-UIR/5-FS/2021

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau menerangkan bahwa :

Nama : Meliana Nafiya
 NPM : 177310433
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan
 Judul Skripsi : Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Minas Kabupaten Siak
 Persentase Plagiasi : 24%
 Jumlah Halaman : **106 (Abstrak s/d Daftar Pustaka)**
 Status : **Lulus**

Adalah benar-benar sudah lulus pengecekan plagiasi dari Naskah Publikasi Skripsi, dengan menggunakan aplikasi *Turnitin* (terlampir).
 Demikianlah surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 15 April 2021

Hormat Kami,
 Wakil Dekan Bid. Akademik


Indra Safri, S.Sos., M.Si
NPK. 979702230